

Katalog : 4102004.3308

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG

# 2021



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG

## 2021



## **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG 2021**

Katalog : 4102004.3308  
No ISSN : 2776-852X  
Nomor Publikasi : 33080.2242  
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 84 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ilustrasi Kover:

-

Sumber Ilustrasi:

freepik.com; favpng.com; cleanpng.com

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dicetak Oleh :

TM Advertising & Percetakan

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang 2021 merupakan publikasi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang, perkembangannya antarwaktu, dan perbandingannya antardaerah tempat tinggal (perdesaan dan perkotaan). Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Data BPS tersebut bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta Proyeksi Penduduk 2011-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut sembilan bidang. Kesembilan bidang tersebut terdiri atas Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, Perlindungan Sosial serta Sosial Lainnya, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kajian, perencanaan dan evaluasi berbagai macam program pembangunan yang telah dijalankan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data.

Kota Mungkid, November 2022  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG



Toto Desanto, S.Si, M.Si



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
Bab 1. Kependudukan .....	3
Bab 2. Kesehatan dan Gizi .....	17
Bab 3. Pendidikan.....	27
Bab 4. Ketenagakerjaan .....	43
Bab 5. Taraf dan Pola Konsumsi .....	53
Bab 6. Perumahan dan Lingkungan .....	61
Bab 7. Kemiskinan .....	73
Bab 8. Perlindungan Sosial .....	79
Bab 9. Sosial Lainnya .....	83



## DAFTAR TABEL

	Halaman	
<b>BAB 1. Kependudukan</b>		
Tabel 1.1	Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang, 2021	6
Tabel 1.2	Ratio Ketergantungan dan Ratio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2021.....	8
Tabel 1.3	Persentase Penduduk Wanita Umur 10+ Tahun ke Atas yang Pernah Kawin dan Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Magelang, 2015-2021 .....	11
<b>BAB 2. Kesehatan dan Gizi</b>		
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Magelang, 2019-2021 .....	24
<b>BAB 3. Pendidikan</b>		
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2021 .....	29
Tabel 3.2	Persentase Penduduk usia 15 tahun ke Atas menurut Tipe daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2019-2021.....	32
Tabel 3.3	APS menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019-2021 .....	36
Tabel 3.4	APM menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019-2021 .....	37
<b>BAB 4. Ketenagakerjaan</b>		
Tabel 4.1	Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2021.....	44

Tabel 4.2	Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2021.....	49
-----------	---	----

**BAB 5. Taraf dan Pola Konsumsi**

Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2019-2021.....	54
Tabel 5.2	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Perhari di Kabupaten Magelang, 2019-2021 .....	57

<https://magelangkab.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Indikator-Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021	1
<b>BAB 1. Kependudukan</b>	
Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang, 2021.....	3
Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Magelang, 2021.....	5
Gambar 1.3 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Magelang, 2021	13
<b>BAB 2. Kesehatan dan Gizi</b>	
Gambar 2.1 Angka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Magelang, 2019-2021.....	18
Gambar 2.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, 2017-2021 (Tahun).....	19
Gambar 2.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan dan Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2021.....	21
Gambar 2.4 Persentase Penduduk di Kabupaten Magelang yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, 2019 – 2021.....	22
Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2020-2021.....	23
<b>BAB 3. Pendidikan</b>	
Gambar 3.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang, 2019-2021 (%).....	28

Gambar 3.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang, 2017-2021.....	31
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2021.....	33
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2021.....	35
Gambar 3.5	Perkembangan Rasio Murid Guru dan Guru Sekolah di Kabupaten Magelang, 2020-2021.....	39
Gambar 3.6	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas 2019-2021.....	40

#### **BAB 4. Ketenagakerjaan**

Gambar 4.1	Perkembangan TPAK dan TPT (%) di Kabupaten Magelang, 2017-2021.....	46
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang, 2021 .....	48
Gambar 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2021 .....	50

#### **BAB 5. Taraf dan Pola Konsumsi**

Gambar 5.1	Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Magelang, 2021.....	55
------------	---	----

#### **BAB 6. Perumahan dan Lingkungan**

Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019-2021 .....	63
------------	---	----

Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, Atap Terluas, dan Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2021 (%) .....	64
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Magelang, 2021 .....	65
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar, Jenis Kloset, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Magelang, 2021.....	66
Gambar 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2019-2021 .....	67

## **BAB 7. Kemiskinan**

Gambar 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang, 2017-2021.....	74
Gambar 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang, 2017-2021.....	76

## **BAB 8. Perlindungan Sosial**

Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Magelang, 2019.....	79
------------	---	----

## **BAB 9. Sosial Lainnya**

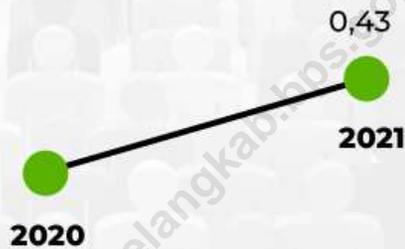
Gambar 9.1	Persentase Rumah Tangga dengan Penguasaan/Kepemilikan Telepon, Telepon Seluler dan Komputer/Laptop di Kabupaten Magelang, 2017-2021.....	84
------------	--	----



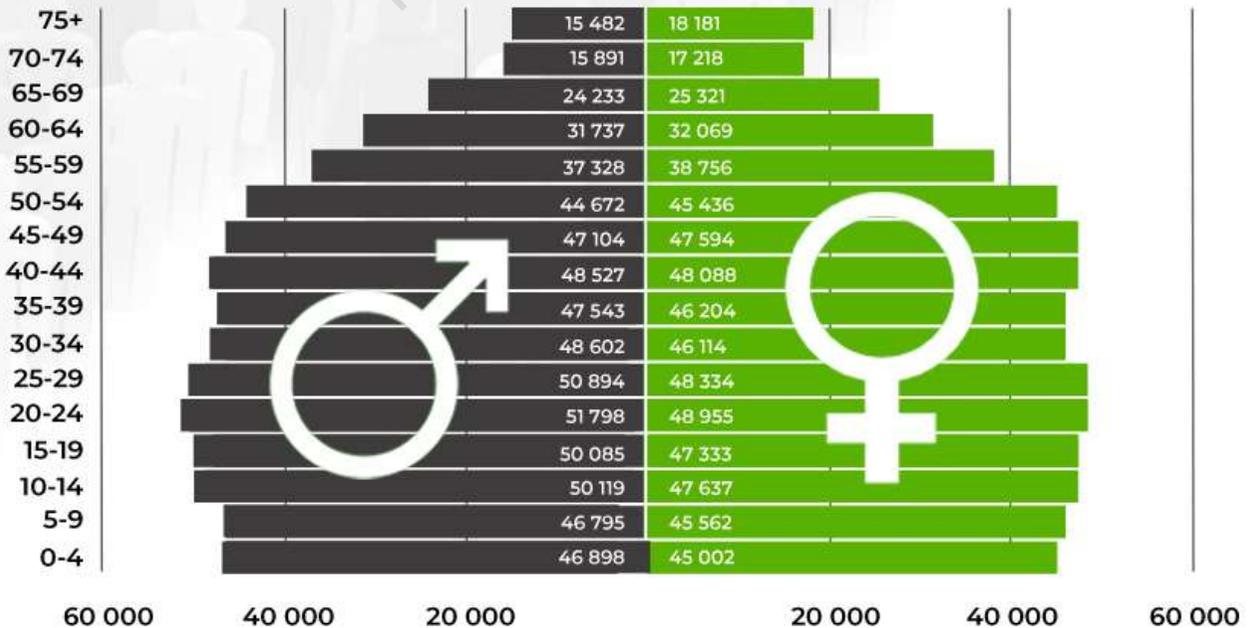


# KEPENDUDUKAN 2021

## Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang, 2020-2021



## Piramida Penduduk Kabupaten Magelang, 2021





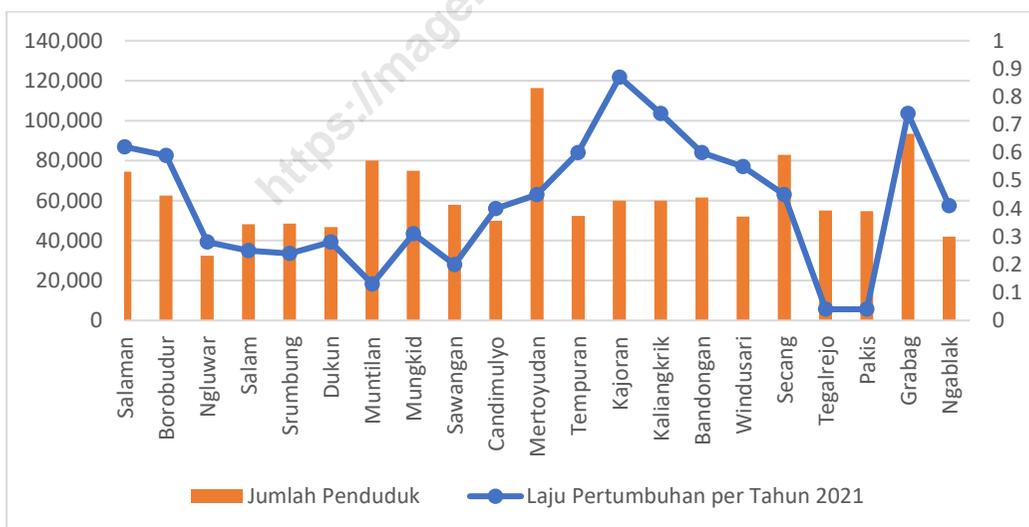
# BAB I

## KEPENDUDUKAN

### 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

**D**ata kependudukan merupakan masalah penting dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Selain itu, data kependudukan juga dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Gambar 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada 2021 berdasarkan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 1 305 512 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (116 356 jiwa), sedangkan jumlah

penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar, sebanyak 32 488 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif, yakni sebesar 0,43 persen.

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, penduduk masuk, dan penduduk ke luar. Laju pertumbuhan penduduk negatif menunjukkan bahwa penduduk yang keluar dan berpindah tempat tinggal maupun yang meninggal lebih banyak dibandingkan dengan kelahiran dan penduduk yang masuk. Laju pertumbuhan penduduk positif menunjukkan bahwa penduduk yang masuk ke wilayah tersebut dan penduduk yang lahir lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar dan pindah.

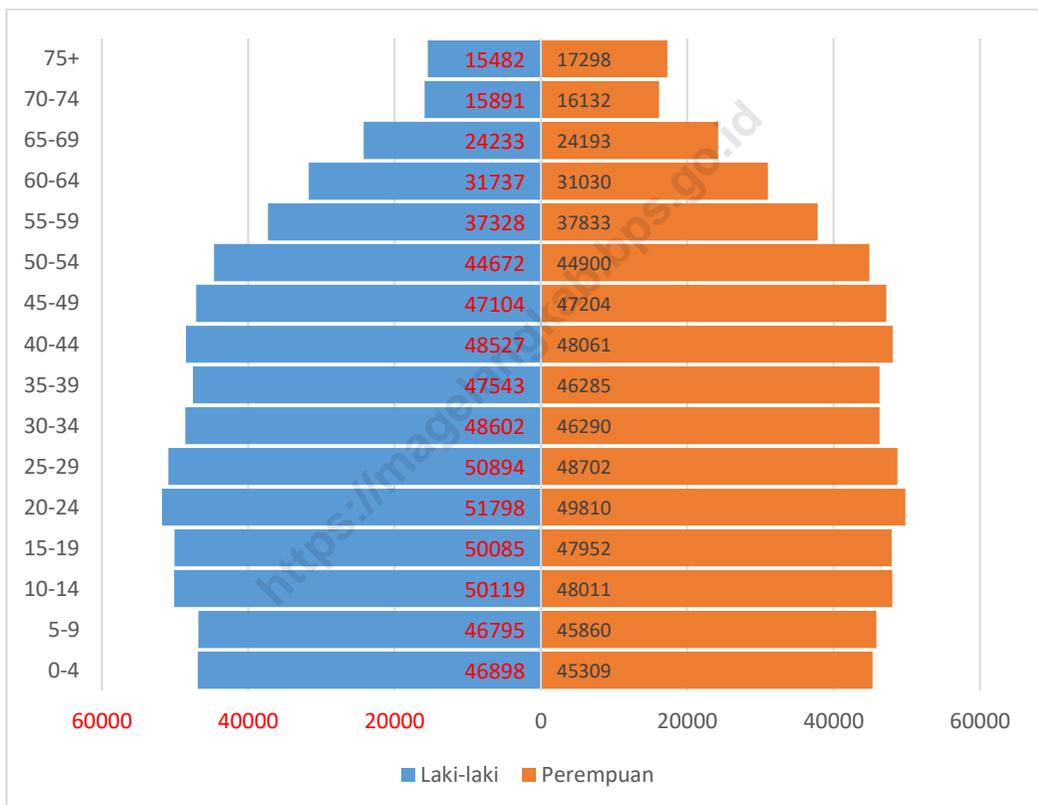
Dari Gambar 1.1, terlihat bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang mengalami laju pertumbuhan penduduk pertahun yang positif pada 2021. Penambahan penduduk tercepat dialami oleh Kecamatan Kajoran, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 0,87 persen pertahun. Pencapaian Kabupaten Magelang dalam hal pengendalian penduduk tersebut, tentunya layak untuk diapresiasi. Hal ini dikarenakan, jumlah penduduk yang besar harus sejalan dengan pemenuhan segala kebutuhan hidup. Jika terjadi kendala terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan risiko meningkatnya jumlah kematian penduduk. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Robert Malthus (1766-1834) dalam teori kependudukannya, beliau berpendapat bahwa penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung.

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasar jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang lebih besar daripada persentase penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada 2021 berjumlah 657 708 jiwa atau sebesar 50,38 persen dari total jumlah penduduk, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 647 804 jiwa atau sebesar 49,62 persen.

Piramida penduduk Kabupaten Magelang berbentuk piramida *expansive* atau dikenal juga dengan piramida penduduk muda karena penduduk yang berusia muda lebih banyak. Piramida *expansive* berbentuk seperti limas, menunjukkan bahwa angka kelahiran cukup tinggi sedangkan angka kematiannya rendah. Bentuk piramida *expansive* Kabupaten Magelang sebagaimana

umumnya terdapat pada negara-negara berkembang, seperti; India, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia. Ciri-ciri Piramida *Expansive* penduduk suatu wilayah/ negara sebagian besar berada pada kelompok penduduk berusia muda. Penduduk pada kelompok usia tua jumlahnya jauh lebih sedikit dari kelompok usia muda. Angka kelahiran bayi relatif tinggi sedangkan angka kematian rendah sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi.

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2022

## 1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 1.1 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan, 2021

Kecamatan	Persentase Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
Salaman	5,70	68,87	1 081
Borobudur	4,79	54,57	1 147
Ngluwar	2,49	22,44	1 448
Salam	3,69	31,63	1 524
Srumbung	3,72	53,19	912
Dukun	3,58	53,41	875
Muntilan	6,13	28,61	2 798
Mungkid	5,74	37,40	2 004
Sawangan	4,43	72,41	799
Candimulyo	3,83	46,93	1 065
Mertoyudan	8,91	45,35	2 566
Tempuran	4,01	49,03	1 067
Kajoran	4,59	83,39	718
Kaliangkrik	4,59	57,33	1 044
Bandongan	4,71	45,78	1 343
Windusari	3,98	61,62	842
Secang	6,35	47,33	1 751
Tegalrejo	4,22	35,88	1 534
Pakis	4,19	69,55	786
Grabag	7,15	77,18	1 210
Ngablak	3,21	43,78	956

Sumber: Diolah dari Kabupaten Magelang dalam Angka 2022

Kepadatan penduduk suatu wilayah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dengan wilayah Kabupaten Magelang yang seluas 1 085,73 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 1 305 512 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Magelang pada 2021 adalah

1 202 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Magelang dihuni oleh rata-rata 1 202 jiwa.

Dilihat dari kepadatan penduduk per kecamatan secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang pada 2021 adalah Kecamatan Muntilan, yaitu sebesar 2.798 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran dengan kepadatan penduduk hanya sebesar 718 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Beberapa kecamatan lain, seperti Srumbung, Dukun, Sawangan, Windusari, Pakis, dan Ngablak juga memiliki angka kepadatan penduduk di bawah 1 000. Jika dicermati, beberapa kecamatan dengan angka kepadatan penduduk di bawah 1000 tersebut merupakan wilayah dengan topografi pegunungan.

Distribusi penduduk antar wilayah yang tidak merata, bisa menimbulkan beberapa permasalahan. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena penyediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, Serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

### **1.3. Angka Beban Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin**

Salah satu dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel.1.2 Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2021

Kecamatan	Rasio Ketergantungan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
Salaman	44,22	101
Borobudur	45,19	101
Ngluwar	46,28	99
Salam	43,82	100
Srumbung	46,35	100
Dukun	44,42	100
Muntilan	42,62	100
Mungkid	44,47	99
Sawangan	44,08	101
Candimulyo	44,32	103
Mertoyudan	41,93	98
Tempuran	42,98	103
Kajoran	45,65	103
Kaliangkrik	45,53	104
Bandongan	43,44	104
Windusari	44,51	106
Secang	43,91	100
Tegalrejo	41,36	102
Pakis	42,16	104
Grabag	45,35	103
Ngablak	41,69	104

Sumber: Diolah dari Kabupaten Magelang dalam Angka 2021

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik.

Penduduk usia produktif di Kabupaten Magelang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan prediksi bahwa bonus demografi di Indonesia akan terjadi pada tahun 2030. Menyambut era bonus demografi tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang perlu mempersiapkan diri dalam ketersediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk usia produktif.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia produktif/nonproduktif didapatkan angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2021 sebesar 43,51. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 43 hingga 44 penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Rasio ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Borobudur dan Kajoran sebesar 45,48 sedangkan terendah di Kecamatan Tegalrejo sebesar 40,64.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada waktu tertentu. *Sex Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin. Angka *sex ratio* dipengaruhi oleh angka kelahiran, migrasi dan kematian berdasarkan jenis kelamin.

Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga guna merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur tertentu. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting

untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen. (Pemprov Kalbar, 2014).

Apabila dilihat dari Rasio Jenis Kelamin (*Sex ratio*/ RJK), *sex ratio* Kabupaten Magelang menunjukkan angka 102 persen, yang artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 102 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) per kecamatan, Kecamatan Windusari memiliki *sex ratio* tertinggi, sebesar 106 persen, sedangkan *sex ratio* terkecil berada di Kecamatan Mertoyudan yaitu 98 persen. Selain Kecamatan Mertoyudan, beberapa kecamatan lain juga memiliki penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal itu ditandai dengan besaran *sex ratio* yang kurang dari 100. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Ngluwar dan Mungkid.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan *sex ratio* adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. *Sex ratio* kurang dari seratus menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini bisa disebabkan karena keluarnya penduduk laki-laki ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, maupun berpindahnya penduduk perempuan ke dalam suatu wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Kecamatan Mertoyudan dengan tingkat pertumbuhan fasilitas ekonomi, menjadi salah satu faktor penyerap tenaga kerja. Hal ini memungkinkan tenaga kerja perempuan banyak masuk ke wilayah ini, untuk mencari pekerjaan, sehingga *sex ratio* untuk Kecamatan Mertoyudan kurang dari 100.

#### **1.4. Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama**

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Kelahiran (*fertilitas*) merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kelahiran yang tinggi bila disertai dengan kematian yang rendah akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingginya angka kelahiran ini sangat berkaitan dengan usia perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama merupakan umur pertama menikah untuk penduduk perempuan yang menandakan dimulainya masa reproduksi.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Magelang, 2015-2021

Tahun	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama (Tahun)		
	≤16	17-18	≥19
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	4,95	19,85	75.2
2016	12,63	23,65	63.72
2017	13,11	21,97	64.92
2018	12,27	18,38	69.35
2019	15,22	20,05	64.72
2020	13,68	19,19	67,13
2021	13,78	21,11	65,11

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas 2015-2021, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di bawah 17 ( $\leq 16$ ) tahun terlihat fluktuatif. Pada 2021, wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia di bawah 17 tahun sebesar 13,78 persen, sedangkan wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia 17 tahun ke atas adalah 86,32 persen. Belum cukupnya kesiapan baik dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi membuat perkawinan pertama pada wanita di bawah 17 tahun sangat rentan terhadap risiko kematian dan kesehatan, selain juga memperbesar peluang jumlah penduduk yang dilahirkan. Oleh karena itu, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama di bawah 17 tahun perlu dikendalikan.

## 1.5. Penggunaan Alat/ Cara KB

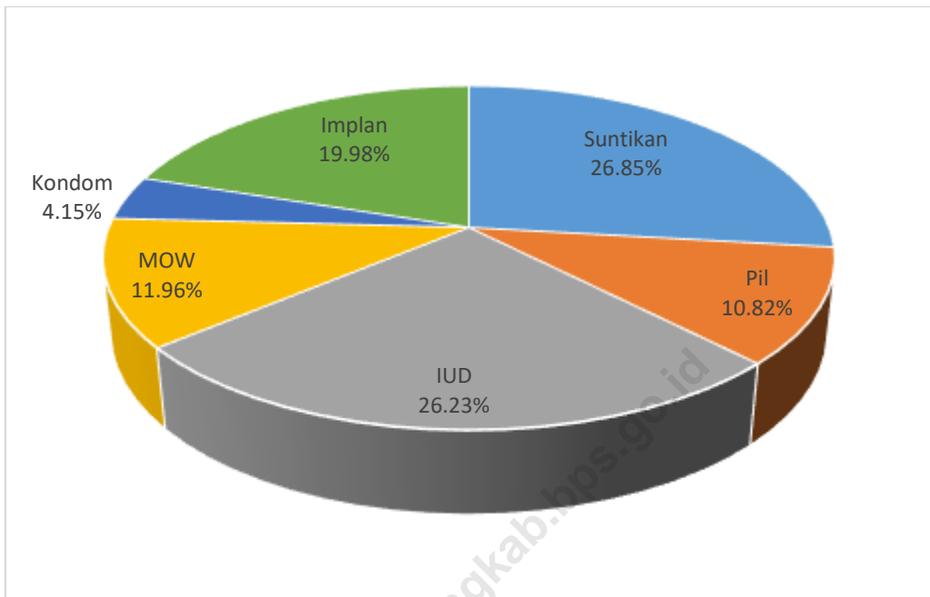
Secara umum, Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang guna menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Jika dijabarkan, program ini pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kelahiran atau menunda kehamilan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), serta menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Kontrasepsi didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi yang dapat direkomendasikan kepada Ibu yang ingin menunda kehamilan dan yang menjarangkan kehamilan adalah pil, IUD/spiral, implan/susuk, suntik atau alat kontrasepsi sederhana, misalnya kondom. Sementara itu, untuk yang tidak menginginkan hamil lagi, alat kontrasepsi yang paling direkomendasikan adalah kontrasepsi mantap yaitu dengan melakukan tubektomi (steril pada wanita) atau vasektomi (steril pada pria) selain semua metode yang lain.

Kontrasepsi ideal harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya: dapat dipercaya, tidak menimbulkan efek yg mengganggu kesehatan, daya kerja dapat diatur sesuai kebutuhan, tidak menimbulkan gangguan ketika koitus, tidak memerlukan motivasi terus menerus, mudah pelaksanaannya, murah harganya dan dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang mengungkapkan penggunaan alat KB suntikan memiliki paling banyak peminat pada 2021, yakni sebanyak 26,85 persen. Hasil tersebut diikuti oleh IUD, yang digunakan oleh 26,23 persen wanita usia subur dan kawin.

Gambar 1.3. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi di Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang dalam Kabupaten Magelang dalam Angka 2022





# KESEHATAN & GIZI 2021

## 22,16 %

sebanyak 22,16 persen penduduk di Kab. Magelang mengalami gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Angka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Magelang 2019-2021



Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, 2017-2021 (Tahun)

## AHH 2021

Kab. Magelang  
meningkat

### 0,49 poin

Meskipun mengalami peningkatan angka kesakitan, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Magelang tetap mengalami peningkatan. Tercatat, selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup meningkat 0,49 poin, dari 73,39 pada 2017 menjadi 73,88 tahun pada 2021.





# BAB 2

## KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

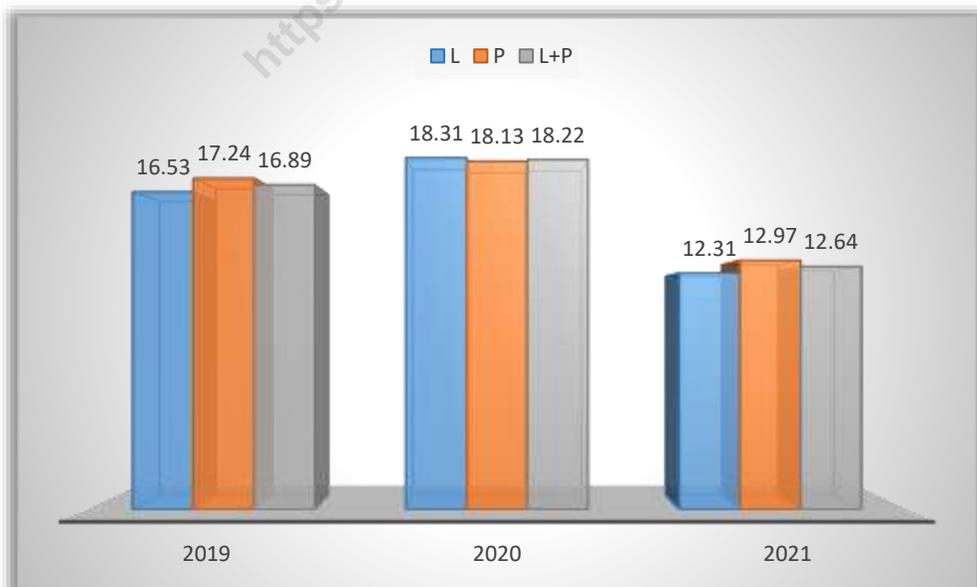
### 2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut Hendrik L. Blum, seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor determinan munculnya masalah kesehatan, yaitu: faktor perilaku/ gaya hidup (*life style*), faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 1997).

Di antara keempat faktor tersebut, faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pencegahan, yang dapat dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Sementara itu, tiga faktor lain masih dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti: semakin memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat di kalangan masyarakat luas, serta memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan / keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak dan beberapa penyakit lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Gambar 2.1 Angka Kesakitan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Magelang 2019-2021



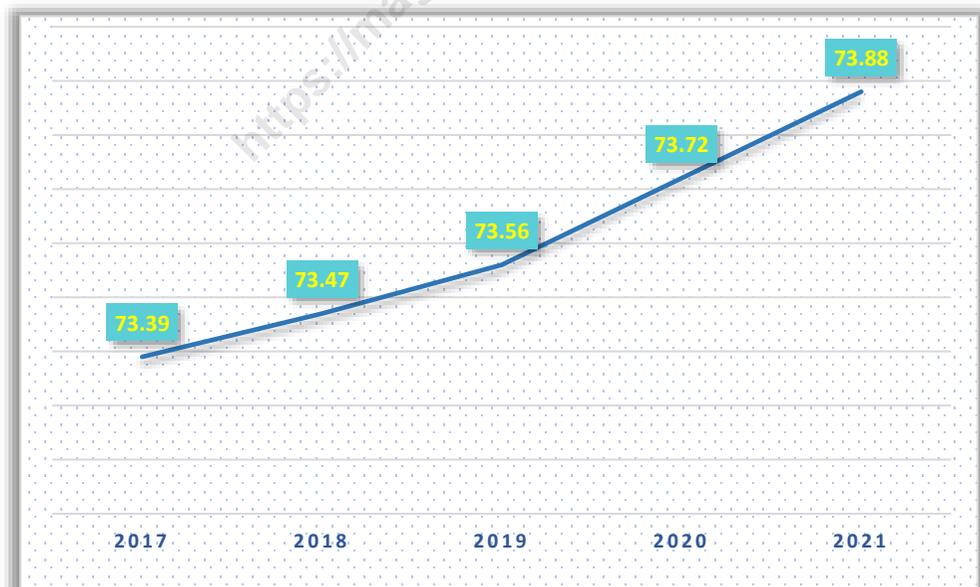
Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2021

Selama tiga tahun terakhir, angka kesakitan penduduk di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, angka kesakitan berada pada level terendah, yang mencapai 12,64 persen. Artinya, sebanyak 12,64 persen penduduk di Kabupaten Magelang mengalami gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Kondisi penurunan angka kesakitan ini bisa terjadi karena pandemi Covid-19 sudah berakhir, dan kondisi kesehatan masyarakat sudah mulai membaik.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil Susenas 2021 menunjukkan angka kesakitan penduduk perempuan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 0,66 poin. Kondisi ini juga terjadi di tahun 2019, di mana angka kesakitan penduduk laki-laki lebih rendah daripada penduduk perempuan.

Meskipun mengalami peningkatan angka kesakitan, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Magelang tetap mengalami peningkatan. Tercatat, selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup meningkat 0,49 poin, dari 73,39 pada 2017 menjadi 73,88 tahun pada 2021.

Gambar 2.2. Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, 2017-2021 (Tahun)



Sumber: BPS Kab. Magelang

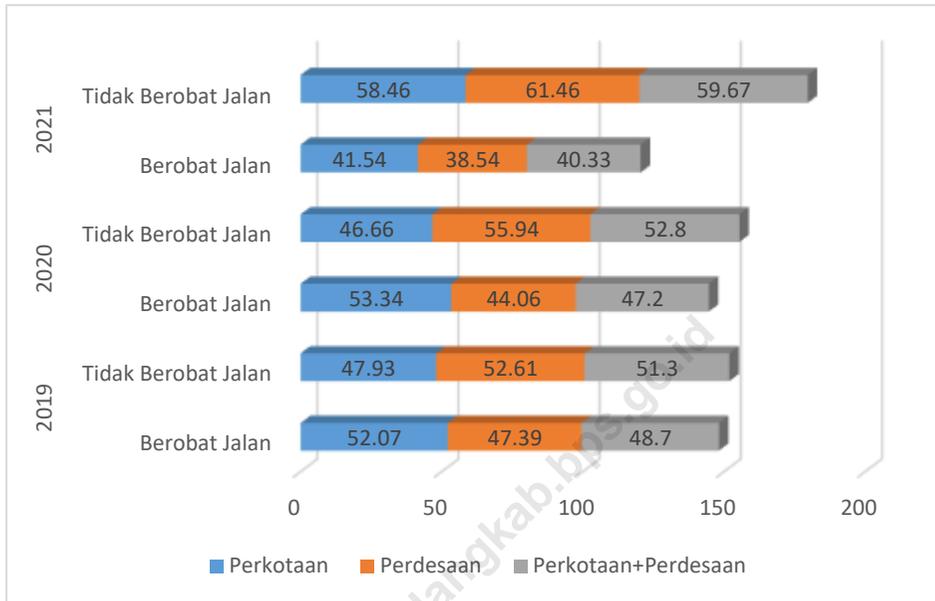
## 2.2. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk, jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk (kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya) serta jenis pelayanan kesehatan.

Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan data Susenas 2021, terdapat 40,33 persen penduduk Kabupaten Magelang yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan, sedangkan sisanya, yaitu 59,67 persen penduduk memutuskan untuk tidak berobat jalan. Adapun yang dimaksud dengan berobat jalan adalah kegiatan atau upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk perdesaan yang berobat jalan lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan, selisih 2,8 poin. Data Susenas 2021 menunjukkan, terdapat 41,54 persen penduduk perkotaan yang berobat jalan, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 38,74 persen. Kondisi ini serupa dengan yang terjadi pada tahun 2020 dan juga di tahun 2019. Adanya perbedaan tersebut, perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak melakukan berobat jalan, sehingga dapat diidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

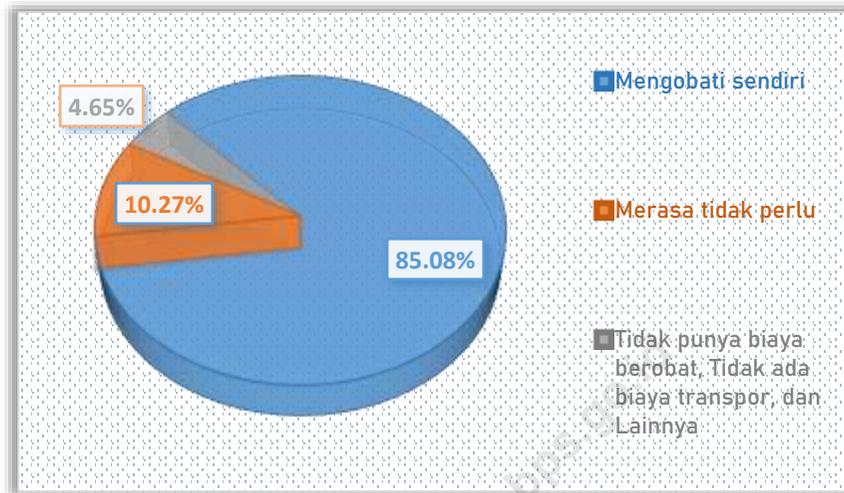
Gambar 2.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan dan Tidak Berobat Jalan menurut Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019-2021



Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2021

Cara pengobatan yang dilakukan masyarakat selain berobat jalan tersebut, misalnya dengan mengobati sendiri atau merasa tidak perlu diobati. Sebanyak 85,08 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengobati sendiri keluhannya. Mengobati sendiri yang dimaksud adalah upaya anggota ruta yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra). Misalnya minum obat yang dibeli dari warung atau apotek tanpa resep dokter, minum jamu, kerokan, kompres, kop, dan sebagainya agar sembuh atau lebih ringan keluhan kesehatannya. Sementara itu, sisanya tidak melakukan berobat jalan dikarenakan merasa tidak perlu, tidak mempunyai biaya, tidak ada sarana transportasi, maupun lainnya.

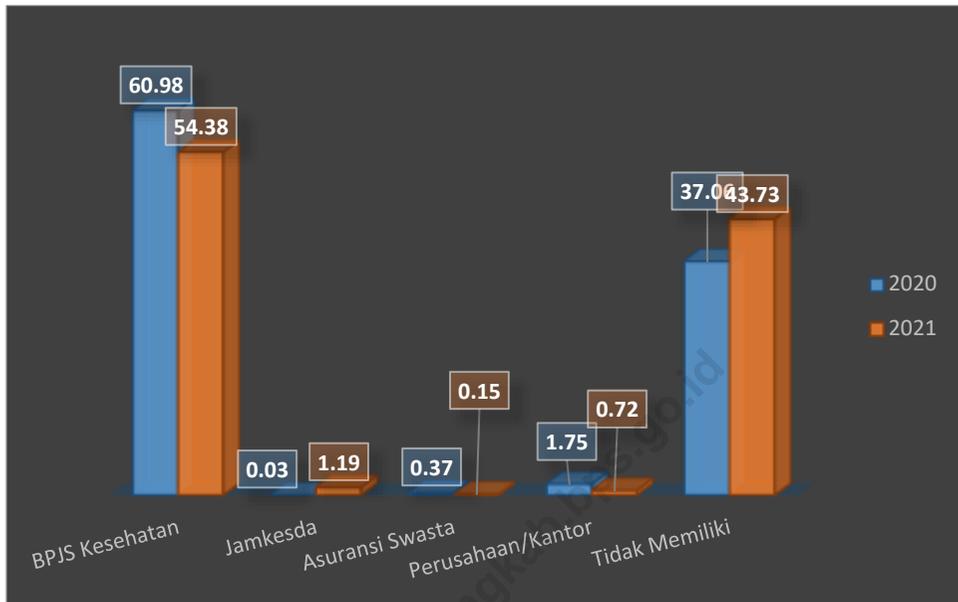
Gambar 2.4 Persentase Penduduk di Kabupaten Magelang yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir menurut Alasan Tidak Berobat Jalan, 2021



Sumber: BPS, Profil Kesehatan Kabupaten Magelang 2021

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS per Januari 2015, pada dasarnya diharapkan mampu membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum, untuk mendapatkan haknya guna memperoleh pelayanan kesehatan gratis, dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau. Di sisi lain, Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan tenaga ahli/spesialis di bidangnya seringkali memberikan stigma bahwa berobat itu mahal, walaupun beberapa biaya pengobatan sudah dicukupi oleh BPJS.

Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Tinggal di Kabupaten Magelang, Tahun 2020-2021



Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2021

Sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang sudah memiliki jaminan kesehatan. Penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 39,36 persen. Jaminan kesehatan ini baik berupa BPJS, Jamkesda, asuransi swasta maupun jaminan dari perusahaan/kantor.

Bila diamati menurut fasilitas kesehatan, tempat praktik dokter/bidan menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak dipilih oleh penduduk Kabupaten Magelang untuk berobat. Hal ini terlihat dari capaiannya yang sebesar 42,76 persen tahun 2020, 45,43 persen tahun 2019, namun di tahun 2021 Klinik/Praktik Dokter Bersama menjadi tempat yang paling banyak dipilih oleh penduduk yakni sebesar 37,24 persen. Alasan dipilihnya fasilitas ini sebagai tempat berobat jalan adalah karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan berobat jalan di rumah sakit di samping juga terdapat bermacam dokter spesialis seperti halnya di rumah sakit.

Puskesmas menjadi pilihan kedua tempat berobat penduduk Kabupaten Magelang setelah praktik dokter/bidan. Tahun 2019 – 2020, menjadikan Puskesmas sebagai sarana berobat setelah praktik

dokter/bidan. Puskesmas terdapat di seluruh kecamatan dengan fasilitas yang lebih lengkap dan keberadaannya terjangkau oleh seluruh penduduk. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, terdapat 29 puskesmas yang tersebar di 21 kecamatan. Ada 8 kecamatan dengan 2 puskesmas, yaitu Salaman, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Mertoyudan, Kajoran, Secang dan Grabag. Sementara di tahun 2021 ini pilihan kedua bagi penduduk untuk tempat berobat setelah Klinik/Praktik Dokter Bersama adalah Praktek Dokter/Bidan yakni sebesar 32,27 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Magelang, 2019-2021

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(8)	(9)	(10)
<b>RS Pemerintah</b>	7,76	7,51	9,15
<b>RS Swasta</b>	3,75	6,41	6,36
<b>Praktik Dokter/Bidan</b>	45,43	42,76	32,27
<b>Klinik/Praktik Dokter Bersama</b>	12,64	13,50	37,24
<b>Puskesmas/Pustu</b>	31,15	31,77	15,54
<b>UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)</b>	3,00	2,73	2,62
<b>Praktik Tradisional/Alternatif</b>	1,90	2,39	2,54
<b>Lainnya</b>	1,52	1,31	0,45

Sumber: BPS, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2021

Klinik/Praktik Dokter Bersama menjadi pilihan ketiga penduduk Kabupaten Magelang untuk berobat jalan. Ini terjadi pada penduduk perkotaan maupun perdesaan. Selama tahun 2019-2020, persentase penduduk yang berobat jalan di Klinik/Praktik Dokter Bersama terus mengalami peningkatan. Sedangkan di tahun 2021 pilihan ketiga tempat penduduk Kabupaten Magelang untuk berobat jalan adalah Puskesmas/Pustu yakni sebesar 15,54 persen.



# PENDIDIKAN 2021

Seseorang dikatakan **melek huruf** apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf.

## 92,53%

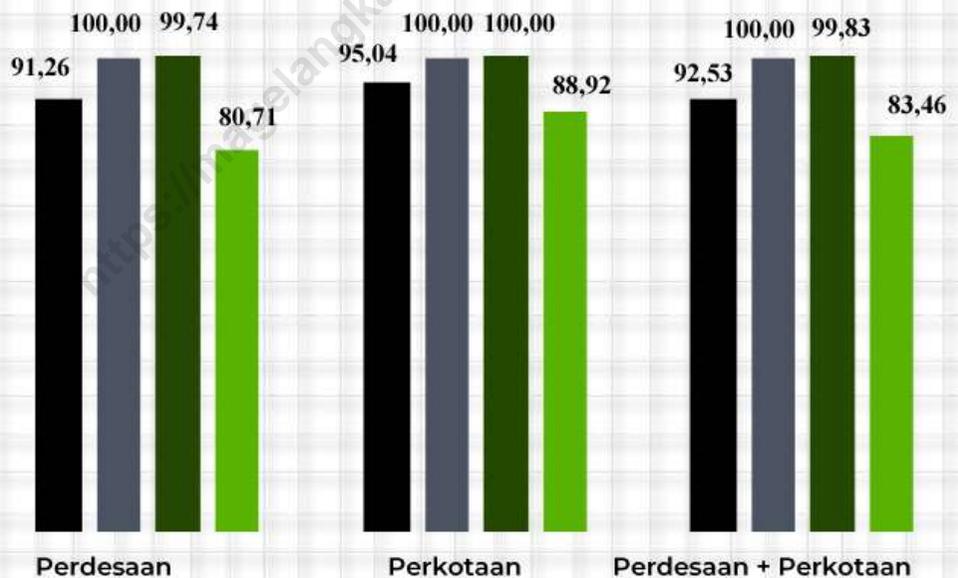
Sebesar 92,53 % penduduk Kabupaten Magelang umur 15 tahun ke atas sudah bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya.

### Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2021

secara umum angka melek huruf di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada daerah pedesaan pada semua kelompok umur

#### Kelompok Umur :

- > 45
- > 25 - 44
- > 15 - 24
- ≥ 15



### Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang, 2017-2021



Pada kurun waktu 2017 hingga 2021, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang meningkat sebesar 0,08 poin, menjadi 12,55 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi.



# BAB 3

## PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Berdasarkan hal itu pula maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”, termasuk segala hal yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana maupun ketersediaan pengajar.

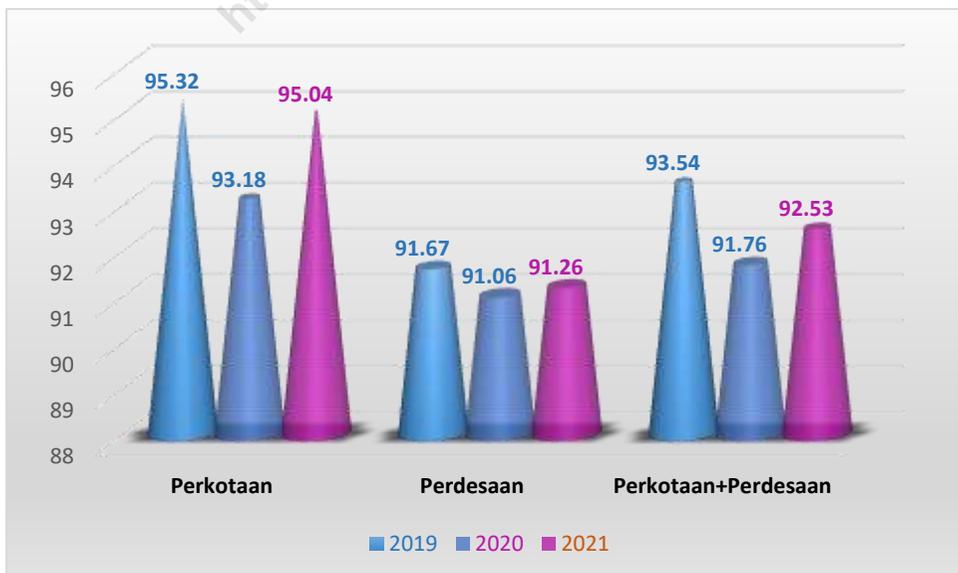
Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, di antaranya Angka Melek Huruf, Tingkat Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

### 3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya. Dengan kemampuan dan kecakapan tersebut memungkinkan untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Selain itu, angka melek huruf merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca dan tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Magelang, 2019-2021 (%)



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

Selama 3 tahun berturut-turut periode 2019-2021, perkembangan angka melek huruf wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang tahun 2021, secara umum angka melek huruf penduduk pada wilayah perkotaan baik laki-laki maupun perempuan, lebih tinggi dibanding angka melek huruf yang wilayah pedesaan baik laki-laki maupun perempuan, dan itupun terjadi di semua kelompok umur. Untuk kelompok umur 15 tahun keatas wilayah perkotaan sebesar 95,04 lebih tinggi dari wilayah pedesaan sebesar 91,26. Kelompok umur 15-24 Tahun di wilayah perkotaan sama dengan wilayah pedesaan sebesar 100,00. Kelompok umur 25-44 Tahun, angka melek huruf di wilayah perkotaan sebesar 99,83 lebih besar dari wilayah pedesaan sebesar 99,74 dan di kelompok umur 45 Tahun ke atas, angka melek huruf di wilayah perkotaan sebesar 88,92 dan di wilayah pedesaan sebesar 80,71. Secara rinci angka melek huruf tahun 2021 per wilayah dan menurut jenis kelamin per kelompok umur ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2021

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	15 Tahun ke Atas	15-24 Tahun	25-44 Tahun	45 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>Perkotaan</u></b>				
Laki-laki	97,36	100,00	100,00	93,92
Perempuan	92,61	100,00	100,00	83,95
Laki-laki+Perempuan	95,04	100,00	100,00	88,92
<b><u>Perdesaan</u></b>				
Laki-laki	95,09	100,00	100,00	88,73
Perempuan	87,49	100,00	99,48	73,23
Laki-laki+Perempuan	91,26	100,00	99,74	80,71
<b><u>Perkotaan+Perdesaan</u></b>				
Laki-laki	95,86	100,00	100,00	90,50
Perempuan	89,16	100,00	99,65	75,74
Laki-laki+Perempuan	92,53	100,00	99,83	83,40

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

## Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal

*Rata-rata lama sekolah =  
Tahun Konversi + (Kelas  
Tertinggi yang Pernah diduduki  
- Tahun Konversi Pendidikan  
yang ditamatkan :  
SD = 6 tahun;  
SMP = 9 tahun;  
SMA = 12 tahun;  
D1 = 13 tahun;  
D2 = 14 tahun;  
D3 = 15 tahun;  
D4/S1 = 16 tahun  
S2 = 18 tahun;  
S3 = 21 tahun.*

(tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah, yang dicapai oleh penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sekolah merupakan hal terpenting dalam pembangunan manusia. Sudah semestinya di era revolusi industri 4.0 ini manusia dibekali oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni. Zaman akan terus berubah dan perkembangan teknologi akan terus berkembang. Seseorang yang tidak bisa

bertahan dengan arus kemajuan teknologi yang pesat perlahan-lahan akan tergerus oleh kemajuan zaman. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang penting bagi manusia.

Gambar 3.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Magelang, 2017-2021



Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2021

Pada kurun waktu 2017 hingga 2021, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang meningkat sebesar 0,08 poin, menjadi 12,55 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang telah mencapai 12,55, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sejalan dengan pencapaian angka Harapan Lama Sekolah, pertumbuhan positif juga dicapai oleh angka Rata-rata Lama Sekolah. Dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang sebesar 7,79 tahun pada 2021, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas hampir mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau setara dengan SMP kelas II. Hal ini bisa diharapkan sebagai modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Magelang yang lebih baik.

### 3.2. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat juga dilihat dari keahlian atau keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan tinggi, cenderung mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan atau keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan atau keahlian, akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

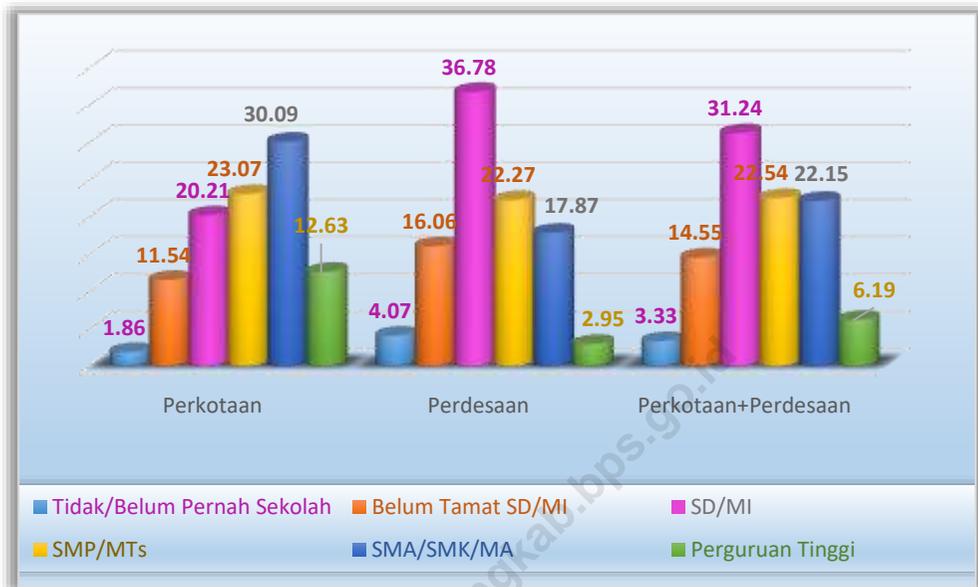
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2019-2021 (%)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,87	2,35	1,86	3,45	2,97	4,07	2,92	2,77	3,33
Belum Tamat SD/MI	11,45	10,28	11,54	17,77	19,12	16,06	15,67	16,19	14,55
SD/ sederajat	21,85	22,39	20,21	30,54	30,24	36,78	27,66	27,64	31,24
SMP/ sederajat	23,39	23,04	23,07	23,20	23,01	22,27	23,26	23,02	22,54
SMA/ sederajat	29,85	32,06	30,09	20,57	18,43	17,87	23,65	22,95	22,15
Perguruan Tinggi	11,58	9,88	12,63	4,47	6,23	2,95	6,83	7,44	6,19

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

Tabel 3.2 menggambarkan komposisi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin berdasarkan hasil Susenas. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, penduduk berumur lebih dari 15 tahun ke atas yang hanya mengenyam pendidikan SD semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin besar.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

Tahun 2021, struktur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar penduduk perkotaan berusia 15 tahun ke atas adalah SMA/SMK/MA (30,09 %), sedangkan untuk penduduk pedesaan berusia 15 tahun ke atas yang paling banyak ditamatkan adalah SD/MI (17,87 %). Yang perlu menjadi pemikiran bersama adalah masih cukup banyak persentase penduduk yang tidak belum tamat SD/MI yang cukup besar, 11,54 % di perkotaan dan wilayah pedesaan hampir mencapai 20 persen yakni sebesar 16,06 %.

Faktor geografis daerah pedesaan yang membuat jarak tempuh rumah ke sekolah menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan di daerah pedesaan. Selain itu faktor pribadi yang menganggap bahwa dengan sekolah belum tentu mendapatkan pekerjaan yang baik dan masih menganggap dengan bersekolah hanya membuang- buang waktu dan biaya. Hal ini menyebabkan kendala untuk tidak bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ijazah pendidikan yang lebih tinggi kadang- kadang juga tidak dianggap penting untuk kelangsungan masa depannya (Hafif Hasanah,

2015). Perlu upaya-upaya yang bisa mendorong masyarakat lebih semakin peduli dengan tingkat pendidikan bagi keluarga dan masyarakat sekitar guna kemajuan anak-anak penerus bangsa.

### 3.3. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur.

$$\text{APS 7-12 tahun} = \frac{\text{Jml pdok yg masih sekolah usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun)

Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur di antaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menjadi indikator ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut.

$$\text{APM SD/MI} = \frac{\text{Jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

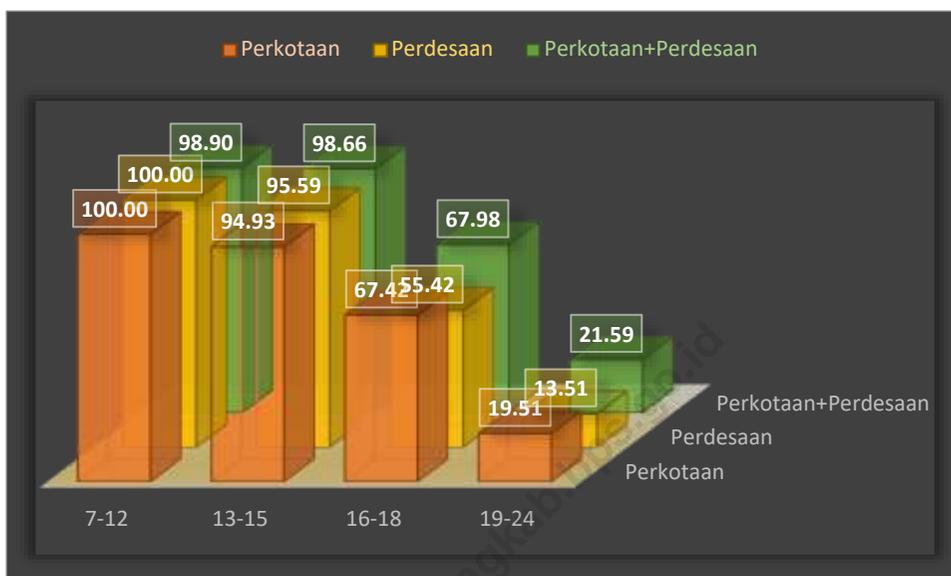
Catatan:

Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SMA/MA : usia 16 -18 tahun, dan Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Pemerintah berharap agar kedua indikator, APS dan

APM, selalu meningkat setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal itu sebagai indikator yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

Berdasarkan data Susenas 2021, secara umum, APS di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dibanding di wilayah pedesaan, itu terjadi pada semua kelompok umur. Kelompok umur paling rendah yakni 7-12 tahun mempunyai nilai APS paling tinggi sebesar 99,90 persen, bahkan di wilayah perkotaan, semua penduduk di kelompok ini bersekolah, yakni APS nya mencapai angka 100 persen. APS pada kelompok umur 13-15 mencapai 98,66 persen, APS kelompok umur 16-18 sebesar 67,98 dan APS kelompok umur 19-24 sebesar 21,59 persen. Semakin tinggi kelompok umurnya, semakin rendah nilai APSnya. Ini menunjukkan belum banyak masyarakat yang bersekolah pada jenjang perguruan tinggi. Perlu motivasi dari berbagai pihak, utamanya keluarga untuk mendorong kemauan anak-anak setelah lulus SMA untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Tabel 3.3 APS menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019-2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7-12	Laki-laki	100,00	100,00	100,00	99,40	98,82	100,00	99,60	99,22	100,00
	Perempuan	100,00	100,00	96,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,90
	Laki-laki+Perempuan	100,00	100,00	98,22	99,72	99,39	100,00	99,81	99,59	99,43
13-15	Laki-laki	100,00	100,00	97,92	100,00	95,27	93,63	100,00	96,82	94,93
	Perempuan	100,00	96,85	100,00	89,65	97,80	97,83	93,32	97,48	98,66
	Laki-laki+Perempuan	100,00	98,44	99,06	95,05	96,49	95,59	96,78	97,14	96,78
16-18	Laki-laki	92,83	88,28	84,52	57,39	62,71	57,23	68,96	71,66	67,42
	Perempuan	57,73	74,94	94,19	71,48	60,49	53,07	67,05	64,90	67,98
	Laki-laki+Perempuan	76,15	82,50	88,61	64,15	61,63	55,42	68,05	68,50	67,66
19-24	Laki-laki	21,55	35,43	34,84	12,29	11,52	11,50	15,37	19,48	19,51
	Perempuan	21,81	25,37	34,90	12,52	19,52	15,59	15,73	21,36	21,59
	Laki-laki+Perempuan	21,67	30,92	34,87	12,39	15,27	13,51	15,54	20,35	20,50

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

Dilihat dari 3 tahun terakhir, kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 tahun memiliki APS yang tinggi yaitu lebih dari 90 persen. Program wajib belajar pemerintah direspon positif oleh masyarakat. APS penduduk umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi semakin meningkat.

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses maupun kemampuan akademis.

Dari sisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang, Kemendiknas dan Kemenag mencatat terdapat 915 sekolah setingkat SD, 201 sekolah setingkat SMP dan 109 sekolah setingkat SMA yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.4 APM menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019-2021

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD/MI/Paket A	Laki-laki	98,37	100,00	100,00	98,37	98,82	99,03	98,37	99,22	99,36
	Perempuan	97,88	98,84	96,31	97,88	98,00	98,70	97,88	98,27	97,99
	Laki-laki + Perempuan	98,13	99,45	98,22	98,13	98,42	98,85	98,13	98,76	98,65
SMP/MTs/Paket B	Laki-laki	80,36	90,35	79,96	80,36	73,43	81,42	80,36	78,96	77,43
	Perempuan	83,44	67,16	80,81	83,44	81,55	78,69	83,44	76,67	81,19
	Laki-laki + Perempuan	81,80	78,90	80,43	81,80	77,33	78,69	81,80	77,85	79,29
SMA/SMK/Paket C	Laki-laki	62,52	72,17	68,50	62,52	47,87	46,70	62,52	56,38	54,84
	Perempuan	64,82	65,88	84,74	64,82	50,05	39,62	64,82	54,88	55,98
	Laki-laki + Perempuan	63,66	69,45	75,38	63,66	48,93	43,82	63,66	55,68	55,33
Perguruan Tinggi	Laki-laki	18,77	25,01	25,19	18,77	9,51	8,74	18,77	14,67	14,38
	Perempuan	20,41	23,11	26,66	20,41	13,45	13,32	20,41	16,48	17,46
	Laki-laki + Perempuan	19,55	24,16	25,86	19,55	11,36	10,99	19,55	15,51	15,86

Sumber: BPS, Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2021

Selain dari APS (Angka Partisipasi Sekolah), tingkat partisipasi sekolah diukur juga dengan APM (Angka Partisipasi Murni). APM ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka APM ini memiliki pola yang hampir sama dengan angka APS. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

APM untuk jenjang pendidikan SD tahun 2021 mencapai 98,65 persen, turun 0,11 poin dari tahun 2020. Hal ini berarti bahwa terdapat 98,65 persen penduduk Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI/Paket A. Meskipun sudah ditetapkan peraturan terkait batas usia masuk SD/ sederajat, namun beberapa orang tua murid terkesan mengharapkan putra/putri mereka yang berusia kurang dari 7 tahun untuk dapat bersekolah di SD/ sederajat, dengan alasan sudah mahir baca tulis. Alhasil, anak usia 6 tahun pun bisa bersekolah di SD/ sederajat, dengan

syarat tertentu. Meski tidak mutlak, kondisi ini secara tidak langsung berperan dalam menyumbangkan belum optimalnya APM SD/ sederajat di Kabupaten Magelang pada 2021. Kendati demikian, jika disandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun, yaitu target 94,8 persen APM SD/ sederajat pada 2020, maka capaian APM untuk Kabupaten Magelang sebesar 98,65 persen tersebut sudah terpenuhi.

APM Kabupaten Magelang 2021 untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3) naik sebesar 0,35 poin. Sementara itu, APM SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat kompak mengalami penurunan.

Menariknya, bila diamati berdasarkan jenis kelamin, APM penduduk perempuan dan penduduk laki-laki cenderung mirip di setiap jenjang pendidikan, dari SD/ sederajat hingga perguruan tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa disparitas gender dalam bidang pendidikan mulai berkurang. Jika diamati lebih jauh, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, APM akan semakin mengerucut. Tidak dipungkiri bahwa keadaan ekonomi rumah tangga memiliki andil cukup besar dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anggota rumah tangga. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah semakin tinggi tingkat pendidikan maka biaya akan semakin mahal. Hal ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait pembangunan pendidikan yang sudah dirancang maupun yang sebagian sudah dilaksanakan, demi mengejar ketertinggalan.

### **3.4. Kualitas Pelayanan Pendidikan**

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang Pendidikan, yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid kelas. Namun, karena ketersediaan data, dalam bab ini hanya dibahas mengenai rasio murid guru dan rasio guru sekolah.

Rasio murid guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Selama 2 tahun terakhir, rasio murid guru untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK relatif stabil dengan tren yang cenderung meningkat. Pada 2020, rasio murid-guru SD/MI adalah 15. Artinya, setiap 1 orang guru mengampu 15 murid SD/MI. Beban ajar guru SD/MI ini tidak jauh berbeda dari guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang pada 2020 rata-rata mengampu 16 murid tiap guru.

Gambar 3.5 Perkembangan Rasio Murid Guru dan Guru Sekolah di Kabupaten Magelang, 2020-2021



Sumber: BPS, Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2021

Tidak jauh berbeda dengan rasio murid guru, rasio guru sekolah juga relatif stabil, meskipun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA beban ajar guru berkurang, yang semula 24 pada 2020 menjadi 23 pada 2021. Dengan rasio guru sekolah yang terstandar, harapannya, proses belajar-mengajar akan semakin efektif di tiap sekolah.

### 3.5. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 25 Tahun ke Atas 2017-2021



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam Kabupaten Magelang dalam Angka 2021

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) Kabupaten Magelang tahun 2021 penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 7,79 tahun. Artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Magelang mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 2 SMP (Kelas VIII).

# KETENAGAKERJAAN 2021



## Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang, 2021

0,60 % Pertambangan & Penggalian

7,15 % Konstruksi

1,33 % Transportasi & Pergudangan

5,56 % Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

0,97 % Jasa Keuangan & Asuransi

0,46 % Jasa Perusahaan

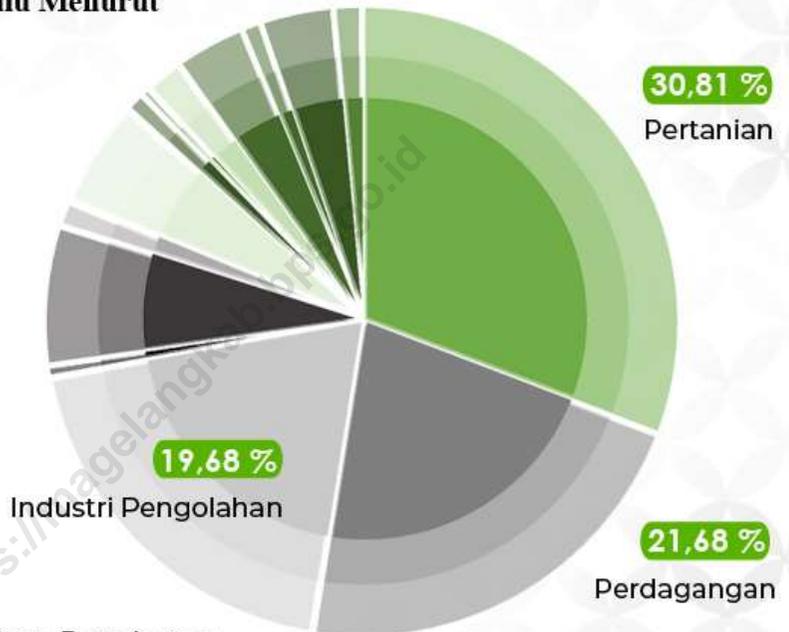
1,97 % Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

3,61 % Jasa Pendidikan

1,00 % Jasa Kesehatan

3,73 % Jasa Lainnya

1,45 % Kategori Lainnya



persentase terbesar kedua adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, 20,08 persen, sedangkan status berusaha dibantu buruh tetap berada pada proporsi terendah, yaitu 3,39 persen. Sementara itu, persentase penduduk dengan status pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar mencapai 27,16 persen

# 31,20 %

penduduk Kabupaten Mageang umur 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai



# BAB 4

## KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Pemerintah. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi, serta pekerja anak.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Konsep ketenagakerjaan yang diusung BPS adalah *The Labor Force Concept*, merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO). Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan (atau sering disebut sebagai pengangguran terbuka). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, dan jumlah jam kerja akan dibahas dalam bab ini.

## 4.1. Kondisi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.

Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas dan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2021

Keterangan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>258.994</b>	<b>515.595</b>	<b>774.589</b>
Bekerja	239.473	496.140	735.613
Pernah Bekerja	15.366	12.316	27.262
Tidak Pernah Bekerja	4.155	7.139	11.294
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>89.956</b>	<b>157.594</b>	<b>247.550</b>
Sekolah	22.141	35.465	57.606
Mengurus Rumah Tangga	53.333	94.180	147.513
Lainnya	14.482	27.949	42.431
<b>Penduduk 15 Tahun Ke Atas</b>	<b>348.950</b>	<b>673.189</b>	<b>1.022.139</b>
<b>Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja</b>	<b>92,46</b>	<b>96,23</b>	<b>94,97</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>7,54</b>	<b>3,77</b>	<b>5,03</b>
<b>Persentase Angkatan Kerja Terhadap Usia Kerja</b>	<b>74,22</b>	<b>76,59</b>	<b>75,78</b>

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2021

Selama tahun 2021, penduduk Kabupaten Magelang berusia 15 tahun ke atas, sebagian besar tinggal di daerah perdesaan. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di daerah perdesaan lebih besar dibanding daerah perkotaan. Sebanyak 76,59 persen penduduk usia 15

tahun ke atas di daerah perdesaan, bekerja. Sementara di daerah perkotaan hanya sebesar 74,22 persen. Sementara itu, persentase angkatan kerja yang menganggur di perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Sebanyak 7,54 persen penduduk angkatan kerja menganggur di perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 3,77 persen.

#### **4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), TPAK Kabupaten Magelang selama empat tahun terakhir menunjukkan capaian yang tidak stabil. Pada 2017, TPAK Kabupaten Magelang sebesar 74,49 persen. Lalu, pada 2018, TPAK Kabupaten Magelang menurun 3,21 poin menjadi 71,28 persen. Pada 2019 dan 2020, TPAK Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan hingga mencapai 76,60 persen pada 2020. Sementara di tahun 2021 ini TPAK Kabupaten Magelang mengalami penurunan menjadi 75,78 persen. Meskipun tidak menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah secara utuh, namun

kenaikan TPAK ini sesungguhnya menunjukkan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Apabila dilihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. TPT tertinggi terjadi pada 2021 yang mencapai 5,03 persen. Meski TPT naik, akan tetapi besarnya pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang masih terkendali. Pengendalian angka pengangguran diharapkan mampu memberi peluang yang lebih besar dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Gambar 4.1 Perkembangan TPAK dan TPT (%) di Kabupaten Magelang, 2017-2021



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2021

### 4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

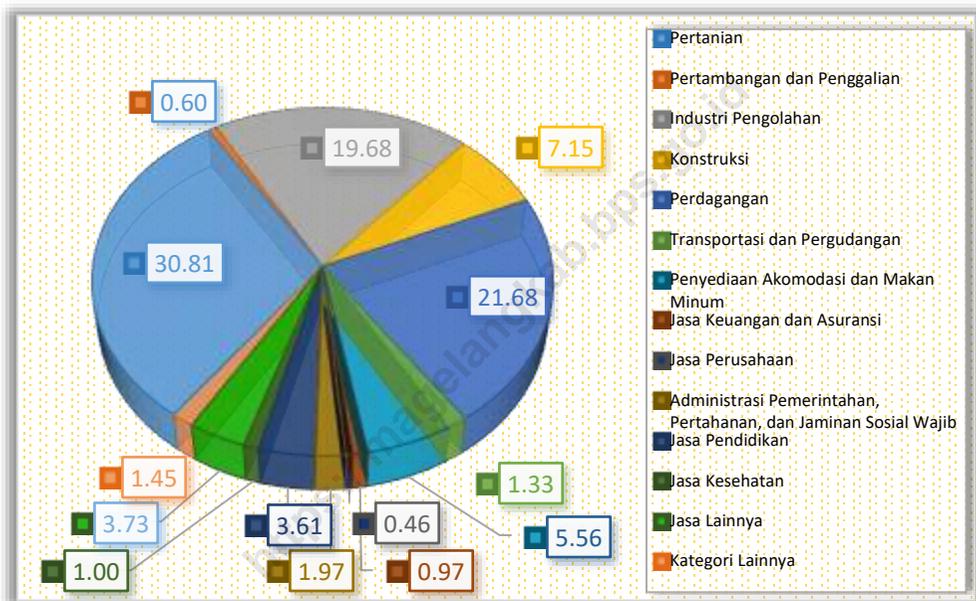
Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada subbab ini dikelompokkan menjadi 14 sektor lapangan usaha yaitu

1. Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan)
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Konstruksi
5. Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor)
6. Transportasi dan Pergudangan
7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8. Jasa Keuangan dan Asuransi
9. Jasa Perusahaan
10. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
11. Jasa Pendidikan
12. Jasa Kesehatan
13. Jasa lainnya
14. Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang)

Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) masih menjadi mata pencaharian terbesar penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu tahun 2020 yaitu sebesar 31,42 persen. Perdagangan yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor menjadi penyerap lapangan usaha terbesar kedua di Kabupaten Magelang pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu sebesar 22,24 persen. Industri pengolahan merupakan sektor penyerap lapangan usaha terbesar ketiga di Kabupaten Magelang pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu yaitu sebesar 19,22 persen. Meski di Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten penghasil pasir, akan tetapi penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu masih sangat sedikit, hanya sebesar 0,72 persen. Pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Magelang juga belum banyak menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum baru berkisar 4,81 persen. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Magelang, mengingat di

Kabupaten Magelang terdapat salah satu warisan budaya dunia yaitu Candi Borobudur dan berbagai macam sektor pariwisata yang telah dikembangkan. Penyerapan tenaga kerja yang maksimal akan meningkatkan penghasilan dan menurunkan angka kemiskinan serta masalah-masalah pembangunan yang lainnya.

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2021

Apabila dilihat berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan, perdagangan (perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor) merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di perkotaan, sedangkan pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan) merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di pedesaan. Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dirinci pada tabel 4.2.

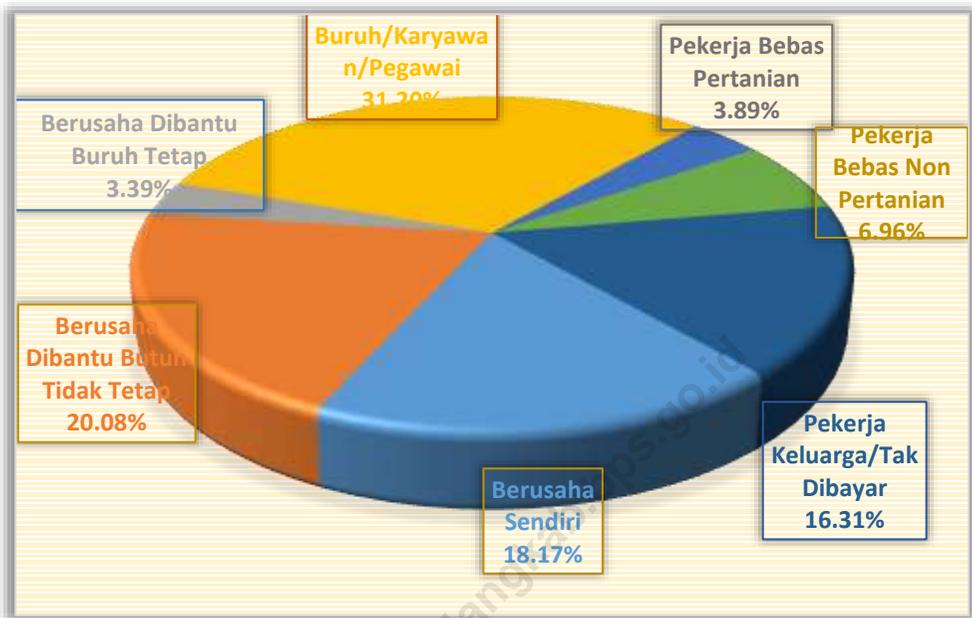
Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Magelang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, 2021

Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pertanian</b>	35 404	191 267	226 671
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	412	3 999	4 411
<b>Industri Pengolahan</b>	61 298	83 463	144 761
<b>Konstruksi</b>	14 258	38 320	52 578
<b>Perdagangan</b>	53 669	105 767	159 436
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	3 804	5 984	9 788
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	20 273	20 661	40 934
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	3 531	3 586	7 117
<b>Jasa Perusahaan</b>	1 022	2 359	3 381
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib</b>	7 754	6 728	14 482
<b>Jasa Pendidikan</b>	11 450	15 095	26 545
<b>Jasa Kesehatan</b>	4 339	3 004	7 343
<b>Jasa lainnya</b>	12 938	14 509	27 447
<b>Kategori Lainnya</b>	9 292	1 398	10 690
<b>Jumlah</b>	239 473	496 140	735 613

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2021

Menurut status pekerjaan utama, persentase terbesar penduduk Kabupaten Magelang yang bekerja selama 2021 adalah sebagai buruh/karyawan, dengan capaian sebesar 29,65 persen. Selanjutnya, persentase terbesar kedua adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, 23,41 persen, sedangkan status berusaha dibantu buruh tetap berada pada proporsi terendah, yaitu 3,24 persen. Sementara itu, persentase penduduk dengan status pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar mencapai 29,04 persen.

Gambar 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2021



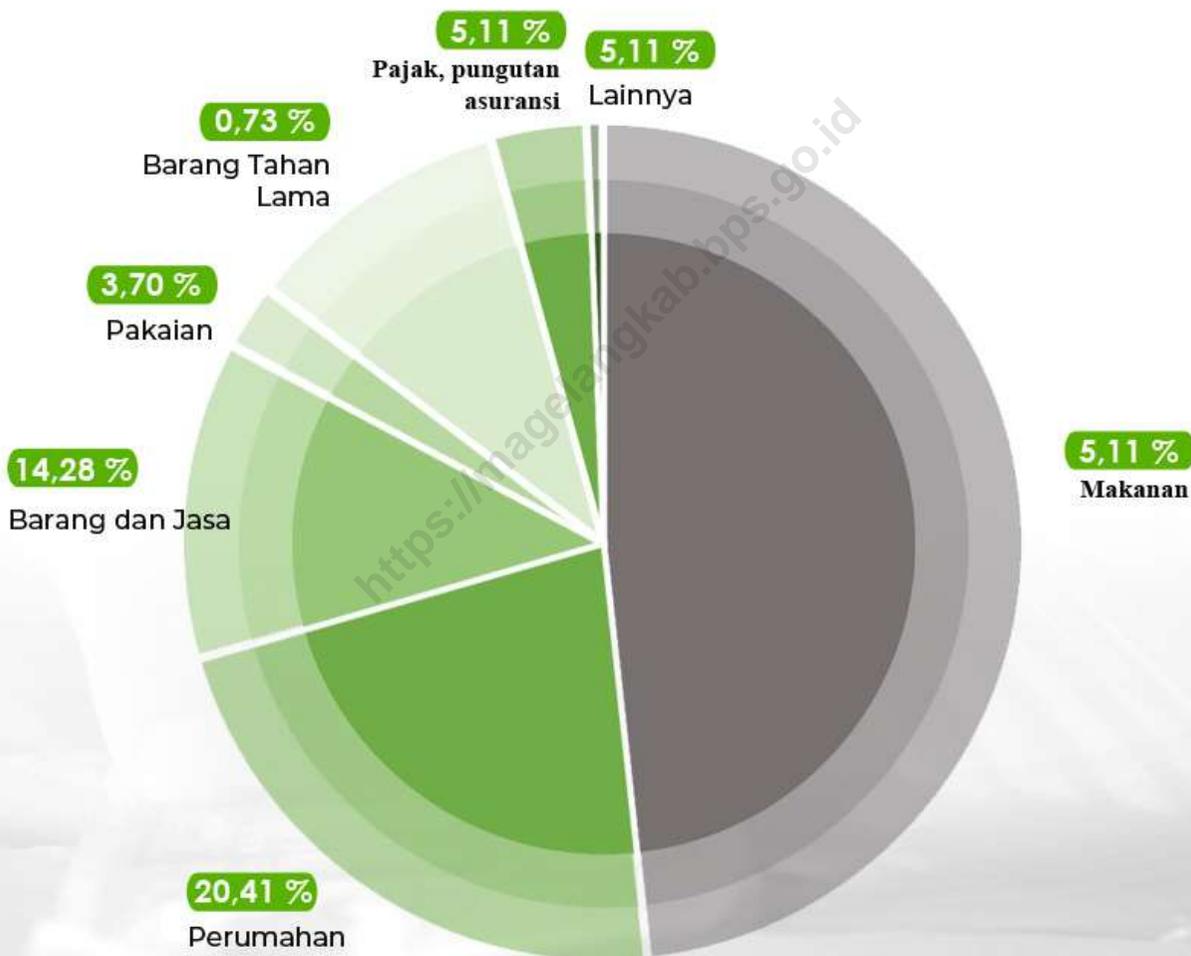
Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2021



# TARAF DAN POLA KONSUMSI 2021

## HEALTHY LIFESTYLE

Rata-rata Pengeluaran Bukan Makanan Perkapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Magelang



**2 031,52**

kilo kalori perkapita perhari

rata-rata **konsumsi energi** dari penduduk di Kabupaten Magelang pada 2021 mengalami kenaikan 3,82 persen, menjadi 2 031,52 kilo kalori perkapita perhari

rata-rata **konsumsi protein** dari penduduk di Kabupaten Magelang pada 2021 mengalami kenaikan 2,95 persen, menjadi 56,87 gram perkapita perhari

**56,87**

gram perkapita perhari



# BAB 5

## TARAF DAN POLA KONSUMSI

### 5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Salah satu teori ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan pengeluaran konsumsi dan tingkat kesejahteraan adalah teori yang dinyatakan oleh Ernest Engel pada tahun 1857 (Wuryandari, 2012). Hasil studi empiris Engel adalah (1) kategori/proporsi terbesar dari anggaran keluarga adalah makanan, (2) proporsi pengeluaran total untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, (3) proporsi pengeluaran total untuk pakaian dan perumahan diperkirakan konstan, sementara proporsi pengeluaran untuk barang-barang mewah bertambah ketika pendapatan mulai meningkat. Dari ketiga hasil studi empiris Engel tersebut, temuan kedua adalah temuan yang lazim berlaku hingga saat ini.

Selanjutnya, perkembangan tingkat kesejahteraan dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan, makin tinggi tingkat kesejahteraan. Ernest Engel dalam Salvatore (2006), mengemukakan bahwa apabila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengeluaran rumah tangga sebagai rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga.

Data rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas makanan dan non makanan (bukan makanan) disajikan dalam Tabel 5.1. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa selama 2018-2020 persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan lebih tinggi daripada komoditas makanan. Persentase pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas makanan pada 2020 adalah sebesar 47,61 persen, meningkat 1,52 poin jika dibandingkan 2019,

yang mencapai 46,09 persen. Berbanding terbalik dengan komoditas makanan, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas bukan makanan tahun 2019 sebesar 53,91 persen justru mengalami penurunan 1,52 poin dibanding tahun 2019 yang mencapai 53,91 persen.

Meningkatnya rata-rata pengeluaran untuk komoditas makanan dan menurunnya pengeluaran komoditas non makanan, secara bisa dikatakan sebagai hal yang sangat wajar. Dengan pandemi yang melanda Indonesia, tentunya banyak pengeluaran masyarakat untuk komoditas makanan ini, bisa untuk pembelian makanan juga untuk pembelian obat dan vitamin guna meningkatkan imun masyarakat.

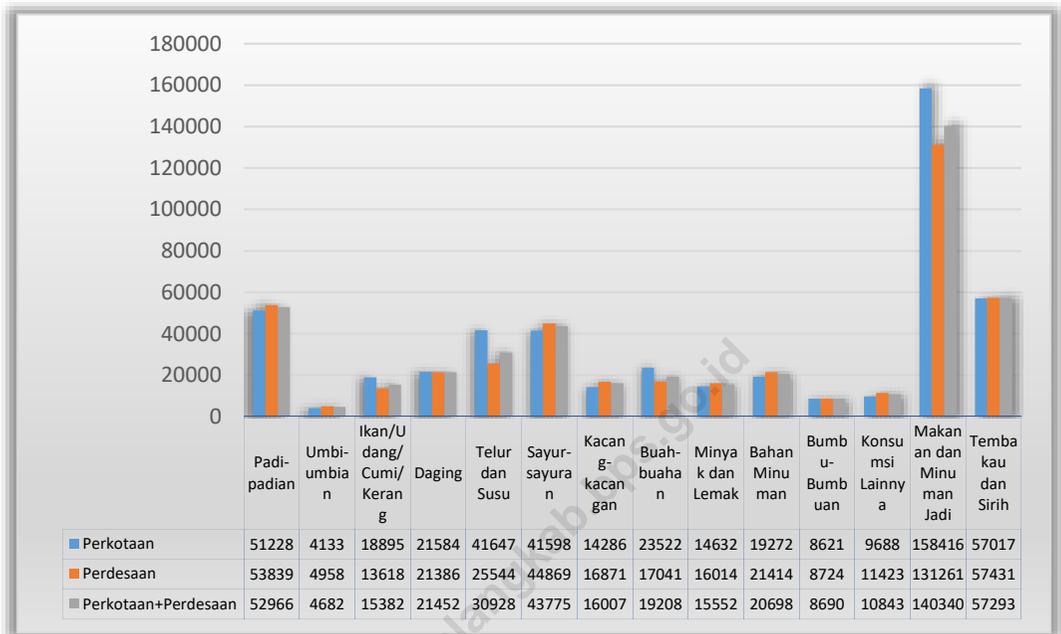
Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Magelang, 2019-2021

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan					
	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	409 227	433 844	457 815	46,09	47,61	48,30
Bukan Makanan	478 606	477 407	490 089	53,91	52,39	51,70
Perumahan	185 920	185 962	210 607	20,94	20,41	22,22
Barang dan Jasa	118 966	130 142	116 384	13,40	14,28	12,28
Pakaian	33 133	33 747	24 311	3,73	3,70	2,56
Barang Tahan Lama	91 809	81 028	98 274	10,34	8,89	10,37
Lainnya	48 778	46 528	40 512	5,49	5,11	4,27
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>887 833</b>	<b>911 250</b>	<b>947 904</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2022

Secara nominal, total pengeluaran rata-rata penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebesar 947 904 rupiah perkapita perbulan. Naik sebesar 36 654 rupiah dibanding tahun 2020. Pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 457 815 rupiah per kapita per bulan, naik 23 971 rupiah dibanding tahun 2020. Sedangkan untuk non makanan sebesar 490 089 rupiah per kapita per bulan, naik 12 682 rupiah dibanding tahun 2020.

Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2021

Rata-rata pengeluaran makanan per kapita per bulan penduduk Kabupaten Magelang menurut komoditas antara daerah perkotaan dan perdesaan memiliki tren yang sama. Pengeluaran terbesar digunakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi. Konsumsi makanan jadi di daerah perkotaan sebesar 1258 416 rupiah perkapita perbulan dan daerah perdesaan sebesar 131 261 rupiah perkapita perbulan. Tren wisata kuliner secara tidak langsung mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Magelang.

Di daerah perkotaan, pengeluaran terbesar selanjutnya adalah komoditas tembakau dan sirih, sebesar 57 017 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk merokok memiliki porsi besar di perkotaan. Selanjutnya, komoditas padi-padian menjadi pengeluaran terbesar ketiga di daerah perkotaan, sebesar 51 228 rupiah.

Seperti halnya di perkotaan, daerah perdesaan menempatkan pengeluaran untuk komoditas padi-padian pada urutan ketiga (53 839 rupiah) dan komoditas tembakau dan sirih pada urutan kedua (57 431 rupiah).

## **5.2. Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein**

Konsumsi adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya (Samuelson & Nordhaus, 1996). Oleh karena itu konsumsi dalam istilah sehari-hari seringkali diartikan sebagai pemenuhan akan kebutuhan makanan dan minuman.

BPS membedakan konsumsi rumah tangga menjadi dua kelompok, yaitu: konsumsi makanan dan bukan makanan. Untuk konsumsi makanan, paket komoditas kebutuhan dasar diwakili oleh 52 jenis komoditas, yaitu: padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.

Kemudian untuk konsumsi bukan makanan, paket komoditas kebutuhan dasar diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan (BPS, 2016), seperti kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Konsumsi tersebut tanpa memperhatikan asal barang (membeli atau hasil sendiri atau pemberian) dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau diberikan kepada pihak lain.

Tingkat kecukupan gizi, yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2013), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2 Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per hari di Kabupaten Magelang, 2019-2021

Konsumsi	Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Energi (kkal)</b>	2019	1 881,13	1 921,85	1 908,36
	2020	1 866,84	2 001,34	1 956,77
	2021	2 007,79	2 043,43	2 031,52
<b>Protein (gram)</b>	2019	54,58	54,82	54,74
	2020	54,37	55,68	55,24
	2021	56,62	57,00	56,87

Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2021

Tabel 5.2 menyajikan rata-rata konsumsi energi dan protein per kapita perhari. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata konsumsi energi dari penduduk di Kabupaten Magelang pada 2021 mengalami kenaikan 3,82 persen, menjadi 2 031,52 kilo kalori perkapita perhari. Sejalan dengan kenaikan pada konsumsi energi, konsumsi protein di Kabupaten Magelang juga mengalami kenaikan, sebesar 2,95 persen menjadi 56,87 gram perkapita perhari.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, dari tahun 2019-2021, terlihat bahwa konsumsi energi dan protein di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Demikian juga untuk konsumsi protein. Daerah perdesaan lebih tinggi konsumsi energinya dibandingkan dengan wilayah perkotaan.



# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN 2021



**100** persen  
rumah tangga  
menggunakan listrik  
sebagai sumber  
penerangan

**92,10** persen  
rumah tangga  
menggunakan dinding  
tembok pada rumahnya

**92,76** persen  
rumah tangga  
memilih genteng sebagai  
bahan atap terluas  
untuk tempat tinggalnya



**87,48** persen  
rumah tangga  
mempunyai rumah  
berlantai selain  
tanah

**93,82** persen  
rumah tangga  
menempati rumah  
milik sendiri

**58,25** persen  
rumah tangga  
memilih mata air sebagai  
sumber air minum

Tahun 2021 sebagian besar rumah tangga sudah memiliki MCK sendiri. Sebagian besar menggunakan kloset jenis leher angsa. Sebagian besar pembuangan akhir tinja sudah dilakukan di tangki septik. Hanya 10,79 persen yang pembuangan akhirnya menggunakan kolam/sawah/sungai dan 11,20 persen menggunakan lubang tanah



# BAB 6

## PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

### 6.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan rakyat.

Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan menurut Kepmen (1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selain sebagai tempat tinggal, rumah seringkali menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai

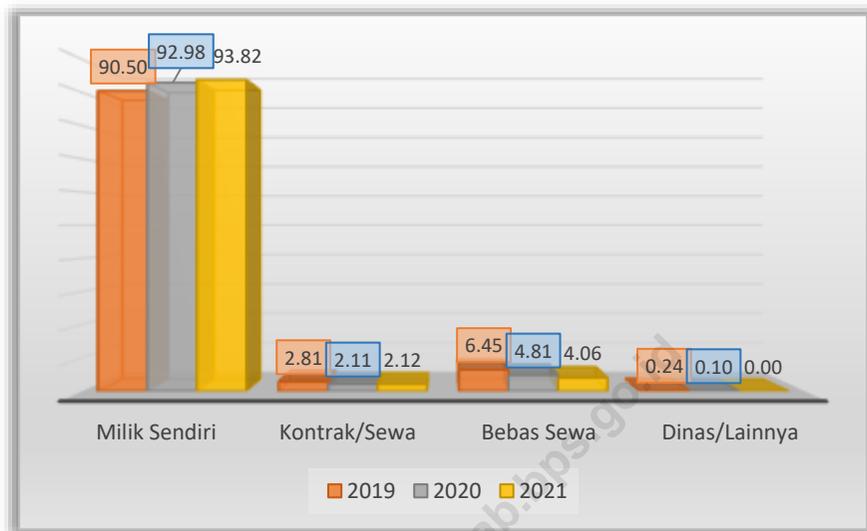
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kondisi perumahan (karakteristik perumahan) dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu rumah tangga. Salah satu arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2016-2020 adalah pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang meliputi perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, dan sanitasi. Pencapaian sasaran kebijakan tersebut memerlukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program oleh berbagai sektor terkait, sehingga fokus kepada target yang sama.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## **6.2. Kondisi Fisik Tempat Tinggal**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

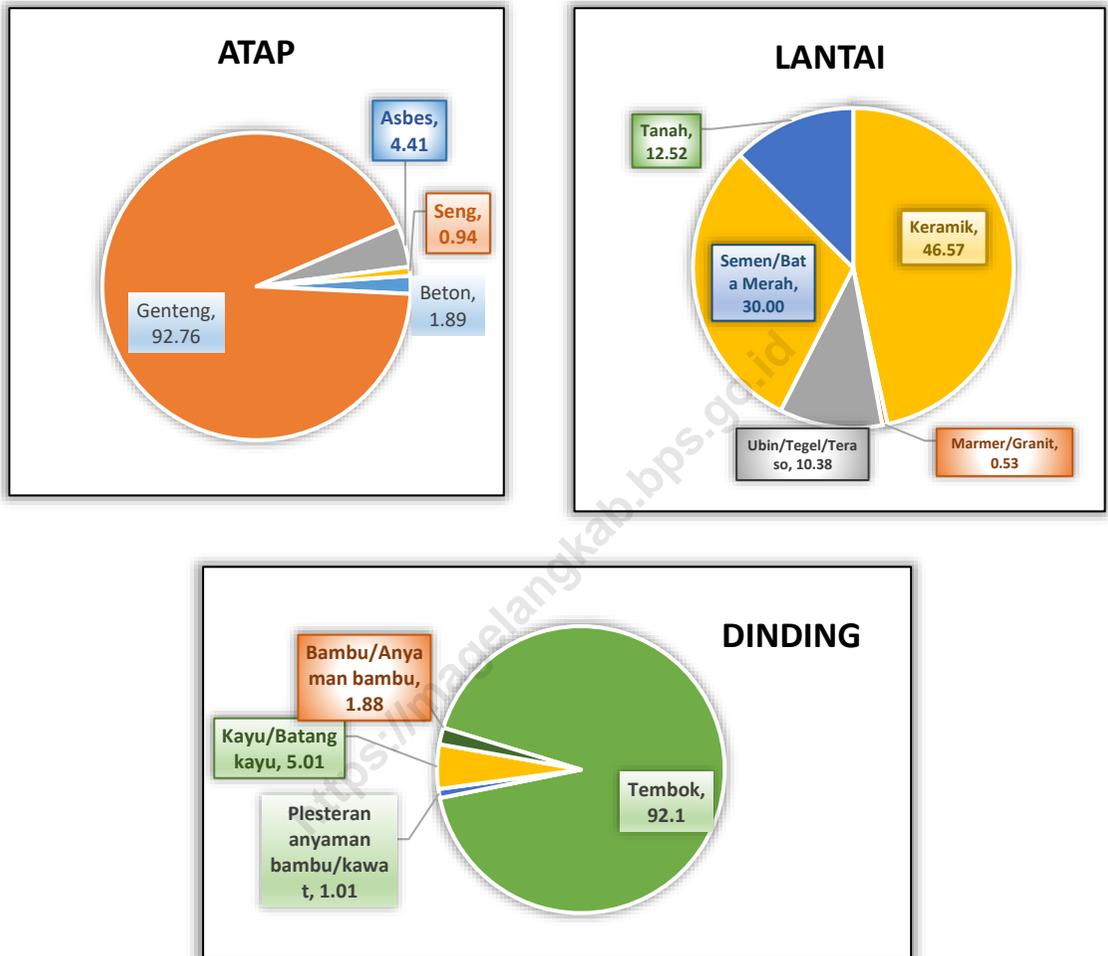
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Magelang, 2019-2021



Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Berdasarkan Susenas 2021, di Kabupaten Magelang terdapat 93,82 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah milik sendiri, sedangkan sisanya, sebesar 6,18 persen bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah namun bukan milik sendiri tersebut terdiri atas 2,12 persen kontrak/sewa, 4,06 persen bebas sewa, dan 0,00 persen dinas/lainnya. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri ini meningkat 0,84 poin dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, Atap Terluas, dan Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2021



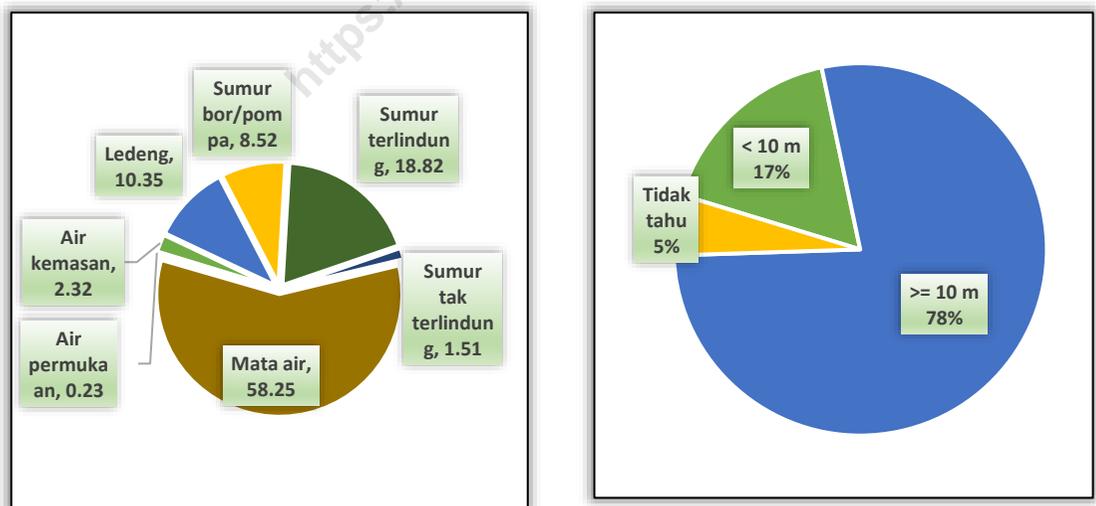
Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Berdasarkan Susenas 2021, sebanyak 92,10 persen rumah tangga memiliki dinding terluas berupa tembok. Kayu/batang kayu merupakan dinding terluas kedua yang dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang, sedangkan dinding dengan bambu/anyaman bambu sebanyak 1,88 persen. Untuk bangunan atap, 92,76 persen rumah tangga sudah beratapkan genteng, sisanya asbes, beton, dan seng. Tidak ada rumah tangga yang beratapkan daun/rumbia/ijuk. Keramik menjadi lantai terluas sebagian besar rumah tangga. Sebanyak 46,57 persen rumah tangga sudah berlantainya keramik. Untuk semen/bata merah, digunakan oleh sebanyak 30 persen rumah tangga dan hanya 12,52 persen saja yang berlantainya tanah.

### 6.3. Fasilitas Rumah Tinggal

Secara harfiah, rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh, seperti pengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut atau bisa juga pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah air minum/air bersih, sumber penerangan dan fasilitas buang air besar.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja di Kabupaten Magelang, 2021

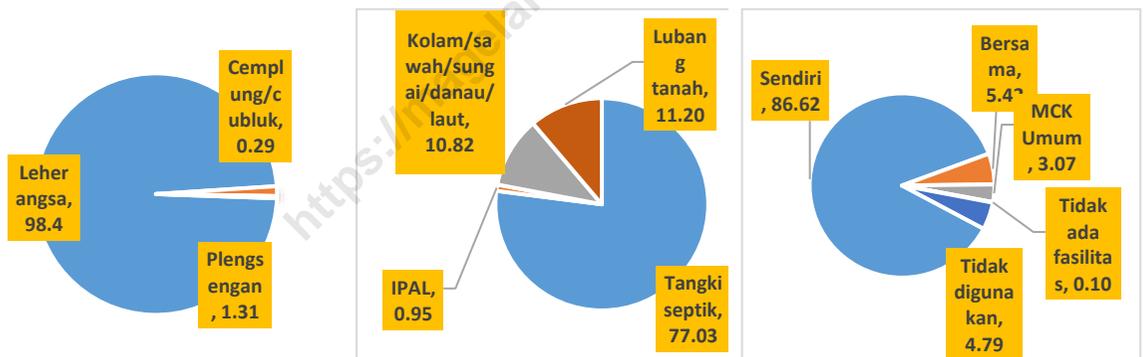


Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Sumur dan mata air menjadi sumber air terbesar yang banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Magelang. Pengguna sumur sebanyak 8,52 persen rumah tangga menggunakan sumur yang terdiri dari 3,81 persen sumur tak terlindungi, 23,10 persen sumur terlindungi, dan 11,29 persen sumur bor/pompa. Pengguna mata air sebanyak 58,25 persen dari rumah tangga. Sisanya air kemasan, ledeng dan air permukaan. Sedangkan jarak penampungan kotoran/tinja ke sumber mata air 78 persen rumah tangga sudah berjarak  $\geq 10$  m.

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas Maret 2020 membagi kriteria penggunaan kloset sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tetapi tidak digunakan dan tidak ada fasilitas buang air besar.

Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar, Jenis Kloset, dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Magelang, 2021



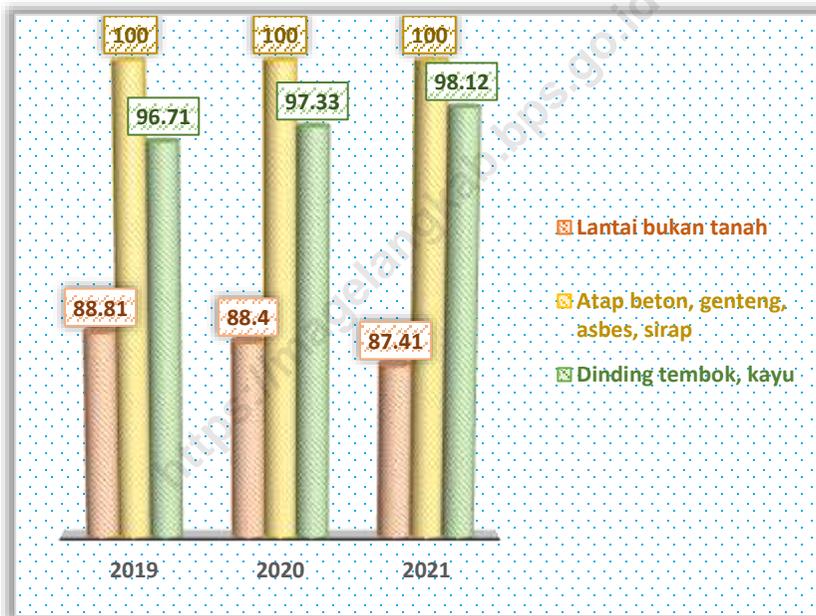
Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Tahun 2021 sebagian besar rumah tangga sudah memiliki MCK sendiri. Sebagian besar menggunakan kloset jenis leher angsa. Sebagian besar pembuangan akhir tinja sudah dilakukan di tangki septik. Hanya 10,82 persen yang pembuangan akhirnya menggunakan kolam/sawah/sungai dan 11,20 persen menggunakan lubang tanah.

## 6.4. Kesehatan Lingkungan

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Magelang, 2019-2021



Sumber: BPS, Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Berdasarkan data Susenas, rumah tangga di Kabupaten Magelang sudah beratap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Tidak ada rumah tangga yang beratap bambu, sirap, kayu, jerami, daun dan rumbia. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tinggal penduduk Kabupaten Magelang sudah berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan lantai rumah bukan tanah untuk tahun 2021 sebesar 87,41 persen. Ini berarti hanya 12,52 persen rumah tangga yang memiliki lantai tanah. Dinding rumah

terluas tembok dan kayu pada rumah tangga di Kabupaten Magelang tahun 2021 sebesar 98,12 persen, sisanya 1,88 persen dinding terluasnya berupa bambu, anyaman bambu dan lainnya.

Selain kedua indikator sebelumnya, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap terluas. Dari hasil Susenas 2019 – 2021 diperoleh bahwa seluruh rumah tinggal di Kabupaten Magelang sudah memenuhi kriteria atap yang layak, yaitu atap terluasnya terbuat dari beton genteng, sirap, seng, ataupun asbes.

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal dapat ditentukan dari kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Air minum layak sesuai dengan metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* didefinisikan sebagai air minum yang terlindungi meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindung dan air permukaan (seperti sungai, danau, waduk, kolam atau irigasi). Definisi tersebut merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian target global memberikan akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2011.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya dalam menunjang kesehatan. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan,

pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera dan sebagainya. Dari hasil Susenas 2021, sebanyak 77,80 persen rumah tangga di mana jarak sumber air minum ke penampungan kotoran lebih dari 10 meter.

Berdasarkan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septi (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Sebanyak 78,40 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang memiliki sanitasi layak di tahun 2021.

Fasilitas perumahan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas 2021, rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Magelang mencapai 100 persen.



# Kemiskinan Kabupaten Magelang

Poverty in Magelang Regency

## 2021



Tingkat Kemiskinan  
Kabupaten Magelang  
mengalami  
peningkatan  
pada Tahun  
2020  
0,6 poin



Tingkat kemiskinan  
penduduk Kabupaten  
Magelang

11,27 %

setara dengan

146,34 ribu jiwa

Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan  
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang, 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>GARIS KEMISKINAN</b> (Rp/KAPITA/BULAN) <i>Poverty line</i>	281.237	296.327	325.921	342.430	353.608
<b>INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)</b> <i>Poverty Gap Index</i>	1,67	1,55	0,98	1,23	1,63
<b>INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)</b> <i>Poverty Severity Index</i>	0,31	0,34	0,17	0,20	0,35



Garis Kemiskinan adalah suatu garis batas besarnya pengeluaran yang mampu memenuhi kecukupan kebutuhan minimum makanan (2.100 kkal per kapita per hari) dan kebutuhan minimum non makanan.

*The poverty line is a line on the level of expenditure that is able to meet the adequacy of minimum needs food (2,100 kkal per capita per day) and minimum non-food needs.*

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) merupakan indeks yang menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Penurunan P<sub>1</sub> menunjukkan adanya perbaikan rata-rata pada standar hidup penduduk miskin.

*The Poverty Depth Index (P1) is an index that explains the average distance between the standard of living of the poor population with the poverty line. A decrease in P1 indicates an average improvement in the living standards of the poor population.*

Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) digunakan untuk melihat tingkat keparahan kemiskinan. Penurunan P<sub>2</sub> menunjukkan berkurangnya ketimpangan kemiskinan

*Poverty Severity Index (P2) is used to see the severity of poverty, P2 reduction shows reduced poverty inequality*

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Source : BPS-Statistics Indonesia, March National Socio Economic Survey



# BAB 7

## KEMISKINAN

Secara umum, keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat yang telah digunakan secara meluas di berbagai negara, di samping ukuran-ukuran lain seperti PDB. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat emisi CO<sub>2</sub> (Nasution, 2016). Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung melambat (Bank Dunia, 2016). Penurunan kemiskinan yang melambat ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Indonesia belum optimal.

Tingkat kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pola penggunaannya (Arifin dan Simatupang, 1988). Masyarakat berpendapatan rendah akan mengalokasikan pendapatannya sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan makanan dibandingkan bukan makanan. Sejalan dengan hal tersebut, Rambe (2008) menuturkan salah satu indikator kesejahteraan keluarga adalah dengan mengukur besarnya pengeluaran. Sementara itu, BPS mengukur kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan batas garis kemiskinan, didasarkan pada data konsumsi serta pengeluaran makanan dan bukan makanan.

Secara formal, dengan pendekatan *basic needs approach*, BPS (2016: 8) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, yaitu sejumlah 2.100 kilo kalori per kapita perhari, dan kebutuhan dasar bukan makanan, berupa sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan kebutuhan dasar lain. Kebutuhan pokok minimum yang dimaksud dalam definisi tersebut merupakan standar yang diterjemahkan secara finansial dalam satuan moneter sebagai suatu garis kemiskinan. Seseorang akan dikatakan miskin jika pengeluarannya di bawah standar garis kemiskinan yang telah ditentukan.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan, dan lainnya.

### 7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Sebanyak 158,15 ribu penduduk miskin pada 2017 telah berkurang menjadi 137,45 ribu jiwa pada 2019. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan pada periode tersebut. Dari 12,42 persen penduduk miskin pada 2017 telah berkurang menjadi 10,67 persen pada 2019.

Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang, 2017-2021



Sumber: BPS, Kabupaten Magelang dalam Angka 2021

Namun, peningkatan justru terjadi pada tahun 2021 yang menjadi tahun terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang meningkat menjadi 154.91 ribu jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin meningkat 0,64 poin menjadi 11,27 persen.

Bahasan mengenai kemiskinan, tidak hanya berhenti pada berapa jumlah dan persentasenya, tetapi juga perlu diketahui juga garis kemiskinan, serta sejauh mana kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri.

## **7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan**

Garis kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang terus meningkat. Sejak 2017-2021, garis kemiskinan di Kabupaten Magelang meningkat secara bertahap, dari Rp 281.237,- perkapita perbulan pada 2017, menjadi Rp 353.608,- perkapita perbulan pada 2021. Meningkatnya garis kemiskinan tersebut besar kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Selama 2017 hingga 2019, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Magelang terus mengalami penurunan. Dari yang semula mencapai 1,67 pada 2017, indeks ini terus menurun hingga mencapai 0,98 pada 2019. Nilai ini mencapai titik terendah selama 5 tahun terakhir sebelum akhirnya meningkat pada 2021 menjadi 1,63. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Berbeda dari nilai P1, nilai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Magelang cenderung berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada 2021, nilai indeks ini kembali meningkat menjadi 0,35 yang sebelumnya sebesar 0,20 pada 2020. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Gambaran garis kemiskinan beserta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2017 hingga 2021 disajikan secara ringkas dalam Gambar 7.2.

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang, 2017-2021



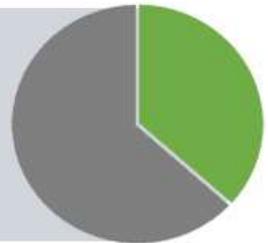
Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, 2017-2021



# PERLINDUNGAN SOSIAL 2021

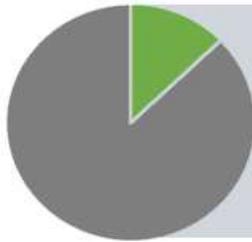
**36,70 %**

sebanyak 36,70 persen  
rumah tangga  
di Kabupaten Magelang  
menerima **BPNT**



sebanyak 12,81 persen  
rumah tangga  
di Kabupaten Magelang  
menerima **PIP**

**12,81 %**



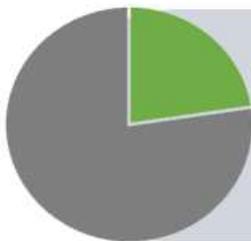
**18,63 %**

sebanyak 18,63 persen  
rumah tangga  
di Kabupaten Magelang  
menerima **KSP**



sebanyak 22,62 persen  
rumah tangga  
di Kabupaten Magelang  
menerima **PKH**

**22,62 %**



Pencarian ...

Program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin antara lain Beras Miskin (**Raskin**)/Beras Sejahtera (**Rastra**), Bantuan Pangan Non Tunai (**BPNT**), Program Indonesia Pintar (**PIP**), Kartu Perlindungan Sosial (**KPS**)/Kartu Keluarga Sejahtera (**KKS**), Program Keluarga Harapan (**PKH**) dan **bantuan sosial** dari Pemerintah Daerah

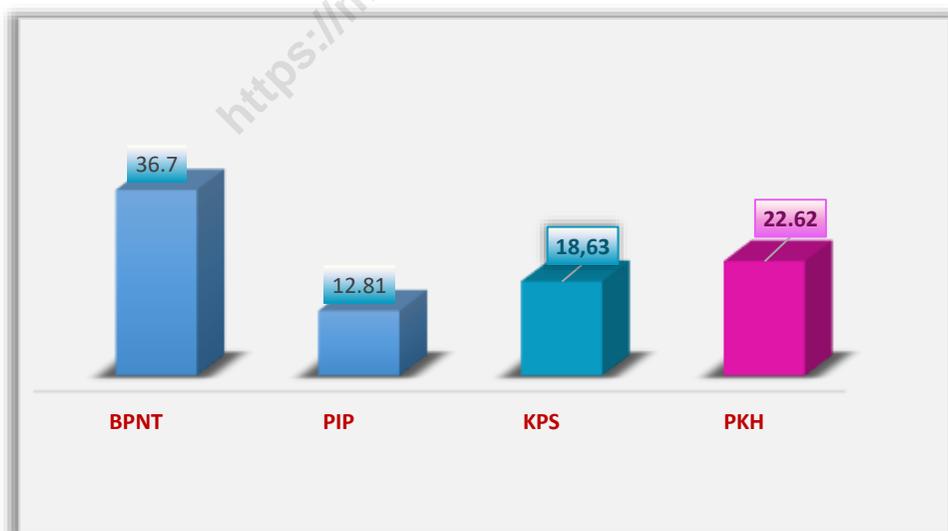


# BAB 8

## PERLINDUNGAN SOSIAL

Program perlindungan sosial di Indonesia memegang peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Perlindungan sosial dianggap sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Indonesia. Program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin antara lain Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Magelang, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Dari hasil Susenas 2021, sebanyak 36,70 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang menerima BPNT. Sebanyak 12,81 persen rumah tangga menerima program Program Indonesia Pintar (PIP).

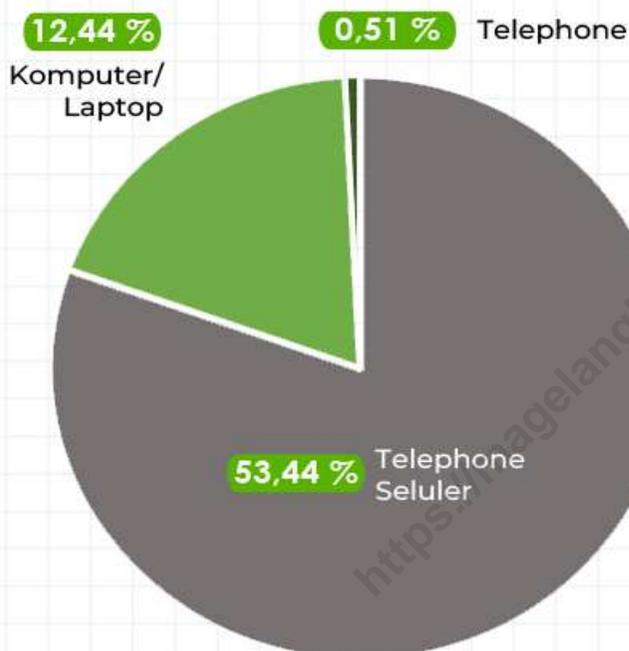
PIP adalah program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Peserta PIP ini mendapatkan bantuan dana dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara rumah tangga penerima KPS sebanyak 18,63 persen. Kartu Perlindungan Sosial adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan sosial. Kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup rakyat miskin antara lain mendapatkan subsidi beras atau lebih dikenal dengan beras raskin, mendapatkan bantuan pendidikan bagi siswa, dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 2014 Nomor 541/3150/SJ Tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Pengaduan Masyarakat.

Rumah tangga penerima PKH tahun 2021 sebanyak 22,62 persen. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.



# SOSIAL LAINNYA 2021

Persentase Rumah Tangga dengan Penguasaan/Kepemilikan Telepon, Telepon Seluler dan Komputer/Laptop di Kabupaten Magelang, 2021



Berdasarkan Susenas 2021, terdapat 0,51 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi telepon. Pengguna telepon dari tahun ke tahun semakin menurun, beralih ke penggunaan HP/telepon seluler.

Dalam lima tahun terakhir pengguna telepon menurun sebanyak 1,40 poin dari 1,91 persen ke 0,51 persen.



Pada tahun 2020 penggunaan komputer/laptop mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,54 poin yakni dari 16,98 % pada tahun 2020 menjadi 12,44 % pada tahun 2021.





# BAB 9

## SOSIAL LAINNYA

Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif. Tingkat kebutuhan pun mulai mengalami pergeseran, dari yang semula merupakan kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer. Berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, serta akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi adalah beberapa contoh kebutuhan yang kini mulai bergeser menjadi kebutuhan primer.

Pertukaran informasi yang cepat antardaerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Penguasaan teknologi seolah menjadi suatu prestise tersendiri, serta indikator kemajuan dari suatu daerah. Arus globalisasi antar wilayah yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan perekonomiannya.

Berdasarkan Susenas 2021, terdapat 0,51 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi telepon. Pengguna telepon dari tahun ke tahun semakin menurun, beralih ke penggunaan HP/telepon seluler. Dalam lima tahun terakhir pengguna telepon menurun sebanyak 1,40 poin dari 1,91 persen ke 0,51 persen.

Selama lima tahun terakhir, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap telepon seluler terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 58,73 persen. Akan tetapi, persentase ini terus menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 53,44 persen pada 2021. Persentase rumah tangga dengan telepon seluler jauh lebih tinggi dibandingkan pesawat telepon biasa. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses telepon seluler menggambarkan bahwa

masyarakat cenderung memilih telepon seluler dibandingkan telepon biasa karena kemudahan mobilitas.

Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga dengan Penguasaan/Kepemilikan Telepon, Telepon Seluler dan Komputer/Laptop di Kabupaten Magelang, 2017-2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021

Seiring arus perkembangan informasi dan teknologi yang semakin deras, masyarakat juga semakin membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam hal penggunaan komputer atau laptop. Selama 2019, terdapat 17,14 persen rumah tangga di Kabupaten Magelang yang menggunakan komputer, baik berupa PC/Dekstop, laptop/notebook, maupun tablet. Meningkat 1,13 poin dibandingkan dengan tahun 2018, Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin membutuhkan peralatan yang menunjang. Akan tetapi, mengalami penurunan pada 2020 sebesar 16,98 dan turun lagi di 2021 sebesar 12,44 persen.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta No. 4 Kota Mungkid 56511  
Telp./Fax. (0293) 788143. E-Mail : [bps3308@bps.go.id](mailto:bps3308@bps.go.id)  
Homepage: <https://magelangkab.bps.go.id/>

ISSN 2776-852X



9 772776 852008